



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 328);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo. (Perda Pemuda No 13 Th 2024)
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. (Perda Pemuda No 13 Th 2024)
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo. (Perda Pemuda No 13 Th 2024)
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. (Perda Pemuda No 13 Th 2024)
5. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun. (Perda Pemuda No 13 Th 2024)
6. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. (Perda Pemuda No 13 Th 2024)
7. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pembangunan dan pengembangan potensi pemuda. (Perda Pemuda No 13 Th 2024)
8. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda. (Perda Pemuda No 13 Th 2024)
9. Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan yang selanjutnya disebut RAD Pelayanan Kepemudaan adalah rencana aksi tingkat Daerah yang berisi Program serta kegiatan di bidang Kepemudaan guna mewujudkan sumber daya Pemuda yang maju, berkualitas, dan berdaya saing. (Perpres 43 Tahun 2022)
10. Indeks Pembangunan Pemuda yang selanjutnya disebut IPP indeks komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan kepemudaan, yang disusun berdasarkan capaian pada bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi, guna memberikan gambaran menyeluruh mengenai kualitas hidup, kapasitas, dan

peran pemuda dalam pembangunan nasional maupun daerah. (Mulok)

Pasal 2

(Mulok)

RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai wujud koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi lintas sektor dalam pelaksanaan Pelayanan Kepemudaan di Daerah guna mewujudkan sumber daya Pemuda yang maju, berkualitas, dan berdaya saing.

Pasal 3

(Mulok)

RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2025-2029 bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman dan petunjuk dalam pelaksanaan pembangunan kepemudaan bagi Pemerintah Daerah dan jaringan organisasi Kepemudaan serta pemangku kepentingan lainnya;
- b. meningkatkan pemahaman terhadap kondisi pembangunan kepemudaan melalui IPP di lima bidang dasar yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan kerja dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi;
- c. meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan kepemudaan, dalam mewujudkan pemuda yang berdaya saing;
- d. menyediakan perangkat monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan pembangunan kepemudaan.

Pasal 4

(mulok)

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. RAD Pelayanan Kepemudaan;
- b. pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor pelayanan kepemudaan;
- c. monitoring dan evaluasi; dan
- d. pendanaan.

BAB II

RAD PELAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 5

(Psl 24 Perda Skh No 13 Th 2024)

- (1) RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut meliputi:
 - a. bab I gambaran umum kondisi Pemuda Daerah

- b. bab II arah dan strategi
 - c. bab III sasaran dan target
 - d. bab IV program dan kegiatan
 - e. bab V monitoring dan evaluasi
 - f. bab VI penutup
- (2) RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAKSANAAN KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PELAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 6

(psl 23 Perpres 43 Th 2022)

- (1) Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan dilaksanakan mengacu pada RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2025-2029.
- (2) Dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepemudaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

(psl 25 Perpres 43 Th 2022)

- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) melaksanakan rapat koordinasi minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Tim Koordinasi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

(Psl 25 Perpres 43 Th 2022)

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2025-2029 minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (2) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Olahraga.
- (3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 9

(psl 26 Perpres 43 Th 2022)

- (1) Pendanaan pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

(Mulok)

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN
KEPEMUDAAN TAHUN 2025-2029

RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN
TAHUN 2025-2029

BAB I
GAMBARAN UMUM KONDISI PEMUDA DAERAH

A. Latar Belakang

Aspek demografi di Kabupaten Sukoharjo dianalisis berdasarkan struktur usia penduduknya. Berdasarkan rasio antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, terdapat lebih banyak penduduk laki-laki di Kabupaten Sukoharjo, dengan total 466.224 jiwa, dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan yang mencapai 466.456 jiwa. Rincian jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut.

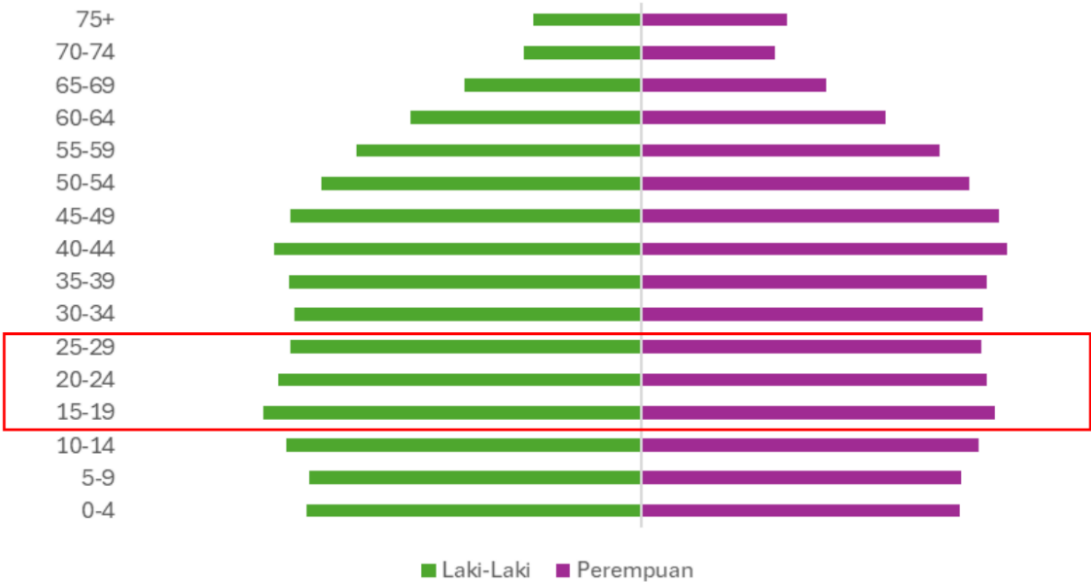
Tabel **Error! No text of specified style in document..**1 Jumlah Penduduk Kabupaten Sukoharjo Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2023

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	32.689	31.208	63.897
5-9	32.510	31.331	63.841
10-14	34.699	33.095	67.794
15-19	36.999	34.619	71.618
20-24	35.545	33.874	69.419
25-29	34.274	33.297	67.571
30-34	33.880	33.519	67.399
35-39	34.386	33.836	68.222
40-44	35.956	35.818	71.774
45-49	34.339	35.076	69.415
50-54	31.295	32.093	63.388
55-59	27.852	29.213	57.065
60-64	22.562	23.899	46.461
65-69	17.217	18.147	35.364
70-74	11.459	13.124	24.583
75+	10.562	14.307	24.869
Total	466.224	466.456	932.680

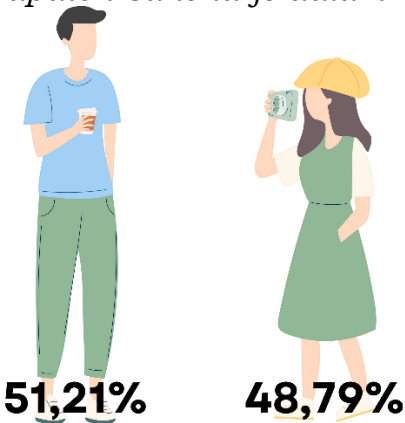
**Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020–2024 (Pertengahan tahun/Juni)*

Sumber: Kabupaten Sukoharjo dalam Angka, 2024

Berdasarkan data kependudukan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo, rentang usia pemuda adalah antara 15 hingga 29 tahun. Jumlah penduduk dalam kategori pemuda tersebut mencapai 208.608 jiwa, yang setara dengan 22,36% dari total jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo.



Gambar **Error! No text of specified style in document..1** Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Sukoharjo Berdasarkan Umur Tahun 2023
Sumber: Kabupaten Sukoharjo dalam Angka, 2024



Gambar **Error! No text of specified style in document..2** Rasio Jenis Kelamin Pemuda Kabupaten Sukoharjo, 2023
Sumber: Kabupaten Sukoharjo dalam Angka, 2024

B. Gambaran Umum Kepemudaan

Isu Strategis Pelayanan dan Pembangunan Kepemudaan pada prinsipnya dapat ditinjau dalam pengukuran Domain Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah alat ukur yang dirancang untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan kepemudaan di suatu wilayah. IPP memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi pemuda berdasarkan beberapa dimensi utama yang relevan dengan aspek kehidupan mereka.

Isu Strategis Pelayanan dan Pembangunan Kepemudaan: Ini mencakup berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas hidup dan peran pemuda. Beberapa isu strategis meliputi:

1. Akses pendidikan: Bagaimana meningkatkan kesempatan pemuda untuk mengenyam pendidikan yang berkualitas.
2. Lapangan kerja dan keterampilan: Memberikan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, serta mendorong kewirausahaan.
3. Kesehatan fisik dan mental: Menjamin pemuda memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang memadai.
4. Partisipasi dalam pembangunan: Melibatkan pemuda secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan kegiatan sosial-politik.

Pengukuran Domain Indeks Pembangunan Pemuda (IPP): IPP adalah indikator komprehensif yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan kepemudaan di suatu wilayah. Indeks ini terdiri dari lima *domain* utama:

1. Pendidikan: Meliputi aksesibilitas dan kualitas pendidikan untuk pemuda.
2. Kesehatan dan kesejahteraan: Mengukur kesehatan fisik dan mental pemuda.
3. Kesempatan dan lapangan kerja: Menggambarkan partisipasi pemuda dalam pasar tenaga kerja dan peluang berkarir.
4. Partisipasi dan keterlibatan: Mengukur seberapa besar kontribusi pemuda dalam pengambilan keputusan dan aktivitas sosial-politik.
5. Gender dan inklusivitas: Melihat sejauh mana kesetaraan gender dan inklusi sosial diterapkan dalam program kepemudaan.

Dengan menganalisis *domain* pada IPP, maka pemerintah dan pemangku kepentingan dapat mengidentifikasi isu strategis kepemudaan ditinjau dari area mana yang membutuhkan perhatian lebih besar. Misalnya, jika nilai *domain* pendidikan rendah, maka perlu ada kebijakan strategis yang fokus pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan untuk pemuda.

1. Domain Pendidikan

Pendidikan adalah hak asasi setiap warga negara yang wajib dipenuhi oleh pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C Ayat (1). Pasal ini menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mengembangkan dirinya melalui pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan dan mengambil manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia. Selain itu, Pasal 31 Ayat (1) juga menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menerima pendidikan.

Domain pendidikan dalam Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) tidak hanya menilai kondisi pendidikan saat ini, tetapi juga mencerminkan potensi pemuda sebagai agen perubahan. Investasi yang tepat dalam pendidikan akan memberikan dampak jangka panjang yang positif, meningkatkan kualitas hidup pemuda, dan mempersiapkan mereka untuk berkontribusi secara efektif dalam pembangunan bangsa.

Berikut merupakan rincian hasil perhitungan masing – masing indikator penyusun yang ada di dalam Domain Pendidikan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024.

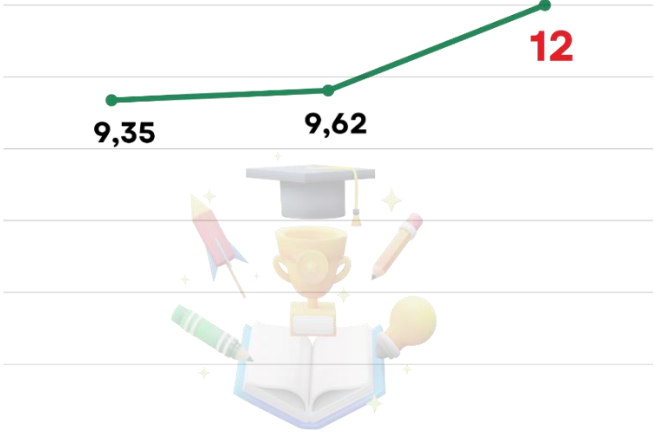
a. Rata-rata Lama Sekolah Pemuda

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat pendidikan suatu populasi, terutama dalam konteks pembangunan manusia. RLS menggambarkan jumlah tahun yang dihabiskan oleh individu dalam sistem pendidikan formal, baik di tingkat dasar, menengah, maupun tinggi. Indikator ini sering digunakan untuk menilai akses dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan, serta untuk

mengevaluasi keberhasilan program-program pendidikan yang telah diterapkan.

RLS yang tinggi mencerminkan bahwa penduduk suatu wilayah cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan, serta menunjukkan bahwa mereka berhasil menyelesaikan lebih banyak jenjang pendidikan. Hal ini berpotensi meningkatkan kualitas sumber daya manusia, karena semakin lama seseorang mengenyam pendidikan, semakin besar pula peluang mereka untuk memperoleh keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Sebaliknya, RLS yang rendah dapat menunjukkan adanya hambatan dalam akses pendidikan, seperti masalah ekonomi, geografis, atau sosial, yang menghalangi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan mereka.

Berikut adalah data capaian RLS Kabupaten Sukoharjo untuk tahun 2021-2023.



A. 2021 2022 2023
Gambar **Error! No text of specified style in document..3**
Capaian Rata – rata Lama Sekolah Kabupaten Sukoharjo 2021 – 2023
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo, 2024

Ditinjau berdasarkan gambaran grafik capaian RLS pemuda Kabupaten Sukoharjo di atas, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir terjadi tren kenaikan pada capaian indikator ini. Pada tahun 2021, RLS pemuda Kabupaten Sukoharjo berada di angka 9,35 tahun dan kemudian naik secara signifikan menjadi 12 tahun pada tahun 2023.

Kenaikan ini mencerminkan upaya yang berhasil dari pemerintah daerah dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi pemuda. Peningkatan angka RLS menunjukkan bahwa lebih banyak pemuda di Sukoharjo yang dapat mengakses jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan menghabiskan lebih banyak waktu dalam sistem pendidikan formal. Hal ini juga menunjukkan adanya perbaikan fasilitas pendidikan, ketersediaan guru yang berkualitas, serta program-program pemerintah yang efektif dalam mendorong partisipasi pemuda untuk menyelesaikan pendidikan mereka.

Lebih lanjut, terjadinya tren kenaikan capaian angka RLS pemuda di Kabupaten Sukoharjo ini juga menggambarkan esadaran yang semakin tinggi di kalangan masyarakat mengenai pentingnya pendidikan untuk masa depan. Dengan meningkatnya RLS, diharapkan pemuda Sukoharjo akan lebih siap menghadapi tantangan di dunia kerja, memiliki keterampilan yang lebih baik, dan mampu berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan daerah. Peningkatan RLS ini juga menjadi indikator positif bagi pertumbuhan sosial dan ekonomi di Sukoharjo, karena pendidikan

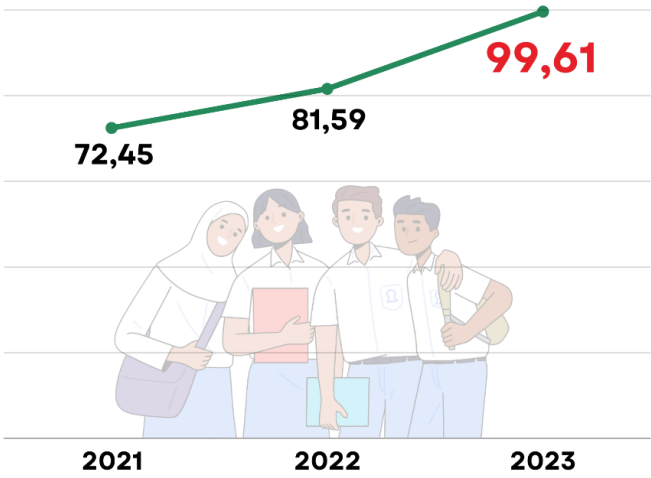
yang lebih tinggi seringkali berkorelasi dengan peningkatan kualitas hidup dan peluang ekonomi yang lebih baik.

b. Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah

Angka Partisipasi Kasar (APK) sekolah menengah merupakan indikator penting yang menggambarkan seberapa besar proporsi penduduk usia sekolah yang terdaftar di jenjang pendidikan menengah, baik SMP maupun SMA/SMK. Peningkatan APK sekolah menengah mencerminkan keberhasilan dalam memberikan akses yang lebih luas kepada anak-anak untuk melanjutkan pendidikan setelah menamatkan sekolah dasar. APK yang tinggi menunjukkan bahwa semakin banyak remaja yang dapat melanjutkan pendidikan mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di suatu daerah. Di sisi lain, angka APK yang rendah dapat menandakan adanya berbagai tantangan, seperti masalah ekonomi, geografis, atau sosial yang menghambat anak-anak untuk melanjutkan pendidikan menengah.

Nilai APK dapat melebihi 100 persen karena siswa yang bersekolah pada jenjang tertentu tidak hanya berasal dari kelompok usia yang sesuai, tetapi juga bisa termasuk siswa yang lebih muda, siswa yang terlambat memulai sekolah, atau siswa yang mengulang kelas.

Dalam hal yang berkaitan dengan pembangunan pemuda, dihitung capaian dari APK Sekolah Menengah dan Perguruan Tinggi. Adapun capaian APK Sekolah Menengah Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2021-2023 adalah sebagai berikut.



B. 2021 2022 2023
Gambar **Error! No text of specified style in document..4**
Capaian APK Sekolah Menengah Kabupaten Sukoharjo 2021 – 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo, 2024

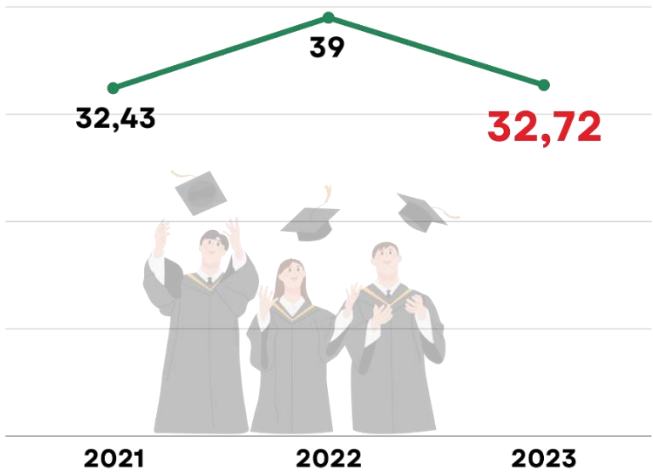
Tren kenaikan angka capaian juga terjadi pada indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah di Kabupaten Sukoharjo pada 2021-2023 dimana kenaikan yang terjadi adalah sebesar 27,16 poin.

Kenaikan APK sekolah menengah ini mencerminkan upaya serius pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan menengah bagi para siswa. Melalui peningkatan fasilitas pendidikan, penyediaan program beasiswa, serta penguatan infrastruktur sekolah, semakin banyak remaja di Sukoharjo yang mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah, baik di SMP maupun SMA/SMK. Hal ini juga dipicu oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan menengah dalam mempersiapkan masa depan yang lebih baik.

Peningkatan angka APK ini merupakan indikator positif bagi pembangunan sumber daya manusia di Sukoharjo. Dengan semakin banyak siswa yang berpartisipasi di jenjang pendidikan menengah, diharapkan kualitas tenaga kerja lokal akan meningkat seiring dengan bertambahnya keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan formal. Selain itu, kenaikan capaian APK juga menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengatasi hambatan-hambatan sosial dan ekonomi yang sebelumnya menghalangi akses pendidikan. Dampaknya, generasi muda Sukoharjo akan lebih siap menghadapi tantangan global dan berkontribusi dalam pembangunan daerah maupun nasional.

c. Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi

Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi merupakan indikator yang menunjukkan seberapa besar proporsi lulusan sekolah menengah yang melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi, seperti universitas, politeknik, atau akademi. APK perguruan tinggi yang tinggi mencerminkan semakin banyaknya mahasiswa yang memperoleh kesempatan untuk mengakses pendidikan lanjutan, yang sangat penting dalam pengembangan sumber daya manusia berkualitas. Berikut merupakan capaian nilai APK Perguruan Tinggi Kabupaten Sukoharjo pada 2021 – 2023.



C. 2021 2022 2023
Gambar **Error! No text of specified style in document..5**
Capaian APK Perguruan Tinggi Kabupaten Sukoharjo 2021 – 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo, 2024

Ditinjau berdasarkan gambaran grafik angka capaian APK Perguruan Tinggi Kabupaten Sukoharjo di atas, terjadi fluktuasi pada kurun waktu 2021-2023. Pada tahun 2021, angka capaian indikator ini adalah 32,43 kemudian naik menjadi 39 pada 2022 dan kemudian turun kembali pada tahun 2023 menjadi 32,72.

Fluktuasi APK perguruan tinggi ini menandakan bahwa masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai kestabilan dan peningkatan yang konsisten. Beberapa hambatan, seperti biaya pendidikan yang masih tinggi atau ketersediaan program pendidikan yang terbatas, menjadi penyebab turunnya minat pemuda untuk melanjutkan studi. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dari pemerintah dan lembaga pendidikan dalam memperluas akses, meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, serta memberikan dukungan finansial bagi mereka yang membutuhkan. Dengan cara ini, Sukoharjo dapat mencapai APK perguruan tinggi yang lebih stabil dan

terus meningkat, sehingga pemuda setempat memiliki peluang yang lebih besar untuk sukses dan berkontribusi dalam pembangunan daerah.

- d. Capaian Nilai Domain Pendidikan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024
- Seperti yang telah dijelaskan pada bagian metodologi bahwa angka capaian domain merupakan hasil perhitungan dari semua indikator pengungkitnya. Berikut merupakan hasil perhitungan capaian nilai domain pendidikan dalam Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024.

Tabel **Error! No text of specified style in document..**2 Hasil Perhitungan Nilai Domain Pendidikan Kabupaten Sukoharjo 2024

	Indikator	Batas Min	Batas Maks	Nilai Indikator	Nilai Domain
X1	Rata-rata lama sekolah	0	15	12	73,33
X2	APK sekolah menengah	0	100	99,61	
X3	APK perguruan tinggi	0	100	32,72	

Sumber: Data Diolah, 2024

Berdasarkan hasil perhitungan indikator pengungkit domain pendidikan IPP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 di atas, diperoleh angka capaian Domain ini sebesar 73,33. Jika kita menilik pada capain domain pendidikan Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2023, maka capaian tahun 2024 ini berada di atas capaian tahun 2023 yang berada di angka 61,57.

2. Domain Kesehatan dan Kesejahteraan

Kemajuan dalam bidang kesehatan memegang peranan penting dalam usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kesehatan penduduk bukan hanya merupakan faktor pendukung keberhasilan program pendidikan, melainkan juga menjadi pendorong peningkatan produktivitas dan pendapatan. Untuk mempercepat kemajuan pembangunan kesehatan, diperlukan kebijakan yang dinamis dan proaktif yang melibatkan semua sektor terkait, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat secara keseluruhan. Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak hanya bergantung pada kinerja sektor kesehatan semata, tetapi juga dipengaruhi oleh interaksi yang dinamis antara sektor-sektor lainnya. Salah satu strategi penting dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan adalah memastikan ketersediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Kesehatan merupakan modal yang sangat vital dalam proses pembangunan nasional, terutama ketika mempertimbangkan dua komponen penting: kesehatan mental dan fisik. Upaya awal untuk mencapai kesehatan yang optimal termasuk pengenalan nilai-nilai agama dan moral pada generasi muda serta memastikan asupan nutrisi yang memadai untuk pertumbuhan yang sehat.

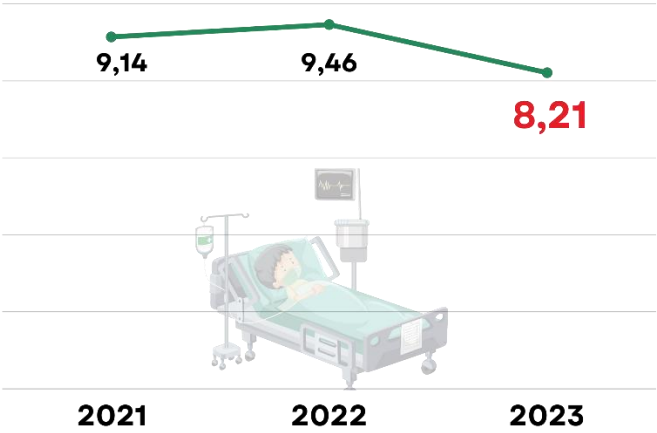
Peran serta seluruh masyarakat, terutama pemuda sebagai pilar intelektual yang memiliki peran strategis dalam masa depan pembangunan Indonesia, sangatlah penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, terutama dalam hal

kesehatan. Generasi muda perlu diajak dan dilibatkan dalam penyelesaian masalah kesehatan bangsa ini untuk meningkatkan kualitas kesehatan mereka sendiri, sehingga dapat menjadi sumber daya yang handal dan kompeten. Peran yang dapat dimainkan oleh generasi muda Indonesia dalam mewujudkan program pembangunan kesehatan masyarakat meliputi partisipasi aktif dan pengadopsian gaya hidup sehat. Berikut merupakan rincian hasil perhitungan masing – masing indikator penyusun yang ada di dalam Domain Kesehatan dan Kesejahteraan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024.

a. Angka Kesakitan Pemuda

Angka kesakitan pemuda merupakan proporsi pemuda yang mengalami masalah kesehatan sehingga mengganggu kegiatan / aktivitas sehari-hari. Kondisi kesehatan yang buruk dan daya tahan tubuh yang menurun dapat menghambat aktivitas sehari-hari, seperti bekerja, bersekolah, mengurus rumah tangga, dan kegiatan lainnya. Akibatnya, hal ini dapat mengurangi produktivitas kerja dan pada akhirnya berdampak negatif pada kinerja secara keseluruhan.

Berikut adalah data capaian Angka Kesakitan Pemuda Kabupaten Sukoharjo untuk tahun 2021-2023.



Gambar **Error! No text of specified style in document..6** Capaian Angka Kesakitan Pemuda Kabupaten Sukoharjo 2022 – 2023
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2024

Ditinjau berdasarkan capaian angka kesakitan pemuda Kabupaten Sukoharjo dalam kurun waktu 3 tahun terakhir di atas, didapatkan gambaran bahwa terjadi tren penurunan yang signifikan pada capaian indikator ini. Pada tahun 2021, capaiannya berada di angka 9,14 dan kemudian turun menjadi 6,47 pada 2023.

Penurunan capaian angka kesakitan pemuda di Kabupaten Sukoharjo menjadi indikasi positif terhadap peningkatan kesehatan di kalangan pemuda. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga kesehatan setempat, seperti kampanye kesehatan, peningkatan akses layanan kesehatan, serta program penyuluhan mengenai pentingnya pola hidup sehat, telah berkontribusi signifikan dalam menurunkan angka kesakitan. Selain itu, kesadaran pemuda akan pentingnya menjaga kesehatan, termasuk melalui olahraga teratur dan pola makan yang baik, juga turut berperan dalam mengurangi prevalensi penyakit di kalangan mereka.

Namun, meskipun terjadi penurunan angka kesakitan, tantangan masih tetap ada. Masih diperlukan perhatian lebih terhadap faktor-faktor yang dapat memengaruhi kesehatan pemuda,

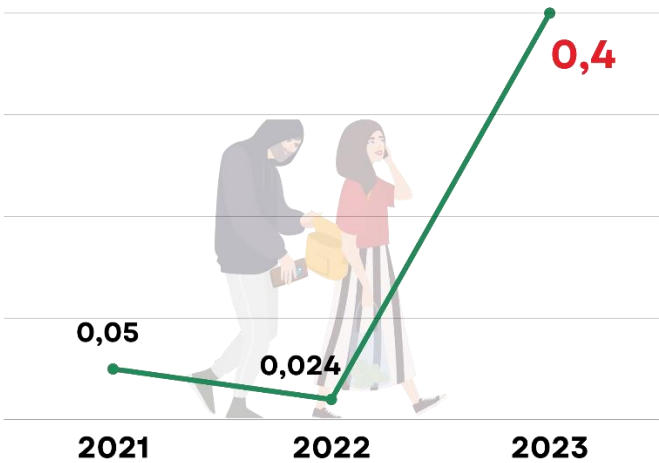
seperti stres, kecanduan teknologi, dan akses yang tidak merata terhadap layanan kesehatan. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan institusi pendidikan menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan pemuda secara menyeluruh. Dengan terus mempromosikan gaya hidup sehat dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan, diharapkan Kabupaten Sukoharjo dapat mencapai kesehatan optimal bagi generasi mudanya, serta menciptakan masa depan yang lebih sehat dan produktif.

b. Persentase Pemuda Korban Kejahatan

Persentase pemuda yang menjadi korban kejahatan merupakan isu penting yang perlu diperhatikan dalam konteks keamanan dan perlindungan masyarakat. Data menunjukkan bahwa pemuda sering kali menjadi target kejahatan, termasuk kekerasan, penipuan, dan kejahatan siber. Faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman tentang hak-hak mereka, ketidakmampuan dalam menghindari situasi berisiko, serta keterpaparan terhadap lingkungan yang tidak aman berkontribusi terhadap tingginya angka ini. Dampak negatif dari kondisi ini tidak hanya dirasakan oleh individu korban, tetapi juga oleh komunitas secara keseluruhan, yang mengurangi rasa aman dan memengaruhi kualitas hidup pemuda.

Situasi ini dapat menjadi landasan bagi kebijakan yang bertujuan meningkatkan perlindungan dan keamanan bagi pemuda. Data tentang persentase pemuda yang menjadi korban kejahatan sangat berguna untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang rentan, jenis kejahatan yang paling umum, serta kelompok pemuda yang lebih berisiko. Dari informasi ini, strategi yang lebih efektif dapat dirumuskan untuk mencegah kejahatan, meningkatkan pendidikan kesadaran hukum, dan memberikan dukungan yang lebih baik bagi korban kejahatan. Selain itu, data ini mencerminkan kualitas intervensi sosial, pola pemantauan kejahatan, dan peran pemuda dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman. Penurunan persentase pemuda yang menjadi korban kejahatan dapat dijadikan indikator keberhasilan kebijakan, peningkatan kesadaran, serta efektivitas intervensi sosial dan hukum yang bertujuan melindungi pemuda dari risiko kejahatan.

Berikut adalah data capaian persentase pemuda korban kejahatan Kabupaten Sukoharjo untuk tahun 2021-2023.



Gambar **Error! No text of specified style in document..7** Capaian Persentase Pemuda Korban Kejahatan Kabupaten Sukoharjo 2021 – 2023

Sumber: Polres Kabupaten Sukoharjo, 2024

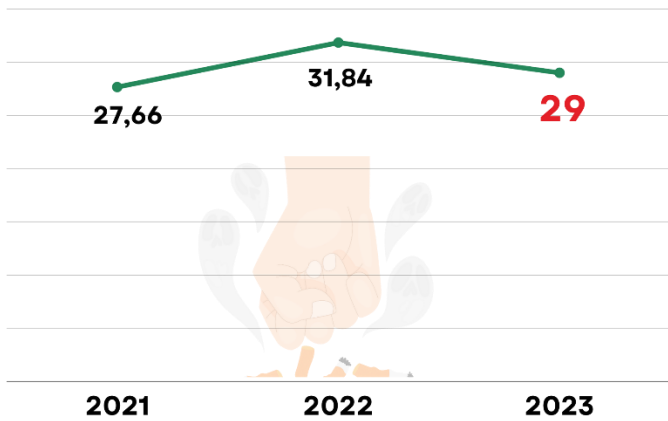
Capaian persentase pemuda korban kejahatan Kabupaten Sukoharjo selama 3 tahun terakhir ini mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2021 angka capaiannya adalah 0,05 dan kemudian turun menjadi 0,024 pada 2022 dan pada 2023 kembali naik ke angka 0,05.

Fluktuasi angka persentase pemuda yang menjadi korban kejahatan di Kabupaten Sukoharjo mencerminkan dinamika yang perlu diperhatikan oleh pihak berwenang dan masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, data menunjukkan adanya perubahan signifikan, baik peningkatan maupun penurunan, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan keamanan yang diterapkan, tingkat kesadaran masyarakat, serta kondisi sosial dan ekonomi. Meskipun fluktuasi ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh pemuda, hal ini juga menunjukkan kemajuan dalam upaya perlindungan terhadap mereka dari kejahatan. Peningkatan keterlibatan pemuda dalam program-program yang mendukung keamanan, serta kerjasama yang lebih baik antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, dapat membantu menurunkan angka korban kejahatan. Oleh karena itu, kolaborasi semua pihak sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi pemuda, sehingga fluktuasi angka ini dapat diminimalkan dan rasa aman dalam masyarakat dapat ditingkatkan.

c. Persentase Pemuda yang Merokok

Merokok adalah aktivitas yang melibatkan pembakaran tembakau dan penghisapan asapnya, baik melalui rokok maupun pipa. Terdapat dua cara umum dalam merokok: yang pertama adalah menghisap dan menelan asap rokok ke dalam paru-paru sebelum mengeluarkannya, sedangkan yang kedua hanya menghisap asap hingga ke mulut dan mengeluarkannya melalui mulut atau hidung. Persentase pemuda yang merokok menjadi isu penting dalam ranah Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), mengingat dampak negatif yang ditimbulkan terhadap kesehatan dan kualitas hidup generasi muda. Data menunjukkan bahwa prevalensi merokok di kalangan pemuda, terutama remaja, cenderung meningkat. Faktor-faktor seperti tekanan sosial, akses yang mudah terhadap produk tembakau, dan kurangnya pendidikan mengenai bahaya merokok berkontribusi terhadap tingginya angka ini. Kebiasaan merokok tidak hanya berisiko bagi kesehatan fisik, seperti penyakit paru-paru dan kanker, tetapi juga dapat memengaruhi kesehatan mental dan kesejahteraan secara keseluruhan, mengurangi produktivitas, dan menciptakan beban bagi sistem kesehatan.

Berikut merupakan capaian angka persentase pemuda yang merokok di Kabupaten Sukoharjo pada 2021 – 2023.



Gambar **Error! No text of specified style in document..**8 Capaian Persentase Pemuda yang Merokok Kabupaten Sukoharjo 2021 – 2023
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2024

Penurunan angka capaian indikator juga terjadi pada persentase pemuda yang merokok Kabupaten Sukoharjo. Angka capaian pada 2021 adalah sebesar 27,66 dan kemudian turun menjadi 25 pada tahun 2023.

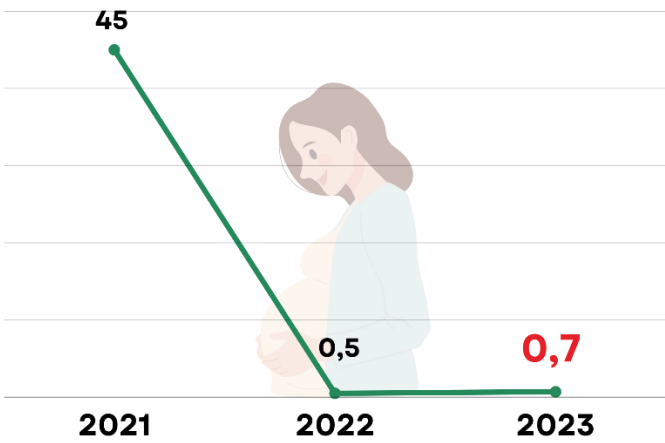
Penurunan angka pemuda yang merokok di Kabupaten Sukoharjo adalah sebuah perkembangan positif dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat. Beragam inisiatif dan program yang diluncurkan oleh pemerintah daerah dan organisasi kesehatan telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perubahan ini. Kampanye kesadaran mengenai bahaya merokok, pendidikan kesehatan di sekolah-sekolah, serta promosi gaya hidup sehat telah berhasil menurunkan prevalensi merokok di kalangan pemuda. Di samping itu, meningkatnya dukungan dari keluarga dan lingkungan sosial juga berperan penting dalam membentuk perilaku yang lebih positif di kalangan generasi muda.

Penting untuk terus melibatkan pemuda dalam program-program yang menekankan gaya hidup sehat dan menghindari kebiasaan merokok. Upaya berkelanjutan, termasuk penegakan regulasi yang lebih ketat terkait penjualan produk tembakau kepada anak-anak dan remaja, serta penyediaan alternatif yang lebih sehat, sangat diperlukan. Melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan institusi pendidikan, diharapkan angka pemuda yang merokok di Kabupaten Sukoharjo akan terus menurun, sehingga dapat menciptakan generasi yang lebih sehat dan produktif di masa depan.

d. Persentase Remaja Perempuan yang Sedang Hamil

Persentase remaja perempuan yang sedang hamil merupakan salah satu isu krusial dalam ranah Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), karena berdampak signifikan terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan generasi muda. Data menunjukkan bahwa angka kehamilan di kalangan remaja perempuan terus menjadi perhatian, dengan faktor-faktor seperti kurangnya akses terhadap pendidikan seks, rendahnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi, serta norma sosial yang sering kali mengabaikan isu ini. Kehamilan yang tidak diinginkan dapat mengakibatkan berbagai masalah, termasuk risiko kesehatan bagi ibu dan bayi, serta hambatan dalam melanjutkan pendidikan dan mencapai potensi penuh mereka di masa depan.

Berikut merupakan capaian angka persentase remaja perempuan yang sedang hamil di Kabupaten Sukoharjo pada 2022 – 2023.



Gambar **Error! No text of specified style in document..9** Capaian Persentase Remaja Perempuan yang Sedang Hamil Kabupaten Sukoharjo 2022 – 2023
Sumber: Data Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Diolah, 2024

Berdasarkan gambaran grafik mengenai Persentase Remaja Perempuan yang Sedang Hamil di atas, didapatkan informasi bahwa terjadi peningkatan angka persentase namun tidak signifikan. Namun fenomena kenaikan angka remaja hamil ini perlu diwaspadai oleh pemerintah. Kondisi ini dapat mengakibatkan berbagai konsekuensi negatif, termasuk risiko kesehatan yang lebih tinggi bagi ibu dan bayi, seperti komplikasi saat melahirkan, masalah gizi, dan peningkatan angka stunting pada anak. Selain itu, remaja perempuan yang hamil cenderung mengalami penghentian pendidikan, yang mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berkontribusi secara ekonomi di masa depan.

e. Capaian Nilai Domain Kesehatan dan Kesejahteraan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024

Nilai capaian domain kesehatan dan kesejahteraan Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 didasarkan pada hasil perhitungan keempat indikator pengungkutnya. Berikut merupakan hasil perhitungan capaian nilai domain kesehatan dan kesejahteraan dalam Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024.

Tabel **Error! No text of specified style in document..3** Hasil Perhitungan Nilai Domain Kesehatan dan Kesejahteraan Kabupaten Sukoharjo 2024

	Indikator	Batas Min	Batas Maks	Nilai Indikator	Nilai Domain
X4	Angka kesakitan pemuda	0	20	8,21	67,50
X5	Persentase pemuda korban kejahatan	0	3	0,4	
X6	Persentase pemuda yang merokok	0	36	29	
X7	Persentase remaja perempuan yang sedang hamil	0	45	0,7	

Sumber: Data Diolah, 2024

Hasil perhitungan capaian domain kesehatan dan kesejahteraan Kabupaten Sukoharjo pada 2024 berdasarkan akumulasi perhitungan

4 indikator pengungkitnya adalah sebesar 67,50. Hasil capaian domain pada tahun 2024 ini apabila dilakukan perbandingan dengan hasil capaian domain pada tahun 2022 dan 2023 lalu yang berada di angka 6,56, maka hasilnya menunjukkan adanya tren kenaikan yang drastis.

3. Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja

Meningkatkan kualitas tenaga kerja merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan ketenagakerjaan. Untuk mencapai hal tersebut, informasi yang komprehensif tentang ketenagakerjaan sangat diperlukan dalam menyusun rencana dan kebijakan yang sistematis, serta sebagai dasar dalam pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkelanjutan.

Salah satu strategi dalam pembangunan ketenagakerjaan adalah melalui pelayanan kepemudaan. Pemuda merupakan bagian penting dari populasi yang memasuki fase penting dalam perkembangan, termasuk dalam memasuki dunia kerja. Pemuda memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam produksi barang dan jasa, baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, beberapa kebijakan khusus diperlukan untuk tenaga kerja pemuda, seperti penyelenggaraan pelatihan kerja, perluasan peluang kerja, serta penempatan mereka di sektor-sektor yang strategis dan sesuai dengan karakteristik pemuda.

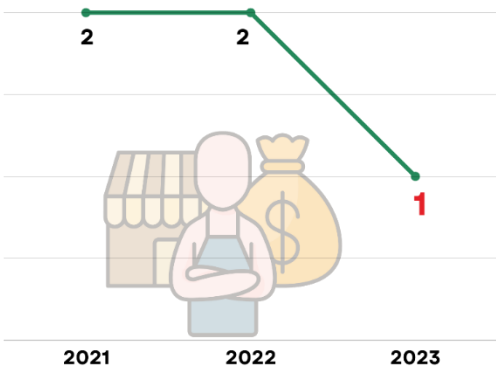
Untuk dapat mengidentifikasi mengenai gambaran sektor tenaga kerja dan lapangan kerja di ranah pemuda Kabupaten Sukoharjo, berikut adalah hasil perhitungan masing – masing indikator penyusun yang ada di dalam Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024.

a. Persentase Pemuda Wirausaha Kerah Putih

Pemuda wirausaha kerah putih didefinisikan sebagai pemuda yang memiliki kemampuan untuk berusaha secara mandiri, sehingga mencerminkan taraf hidup yang baik. Pemuda ini menjalankan usaha sendiri, baik dengan bantuan tenaga kerja tetap maupun tidak tetap, dalam bidang - bidang seperti profesional / teknisi, kepemimpinan / ketatalaksanaan, dan tenaga tata usaha. Pengembangan kewirausahaan kerah putih diharapkan tidak hanya berfokus pada tujuan mendapatkan keuntungan ekonomi, tetapi juga memberikan dampak positif, terutama bagi masyarakat miskin dan marginal melalui kewirausahaan sosial.

Keterlibatan pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri memainkan peran penting dalam menggerakkan roda ekonomi dan memperkuat pilar-pilar pembangunan berkelanjutan. Partisipasi pemuda tidak hanya berdampak positif pada tingkat individu, tetapi juga pada komunitas dan perekonomian secara luas. Melalui kegiatan ekonomi mandiri, pemuda dapat mengembangkan keterampilan, meningkatkan keahlian, serta memperoleh pembelajaran praktis yang berharga. Keterlibatan langsung dalam dunia usaha memberikan mereka kesempatan untuk menghadapi tantangan nyata, meningkatkan kreativitas, serta mengasah keterampilan kepemimpinan dan manajerial.

Guna menggambarkan kondisi pemuda wirausaha kerah putih di Kabupaten Sukoharjo, berikut merupakan capaian indikator persentase pemuda wirausaha kerah putih pada tahun 2021 – 2023.



Gambar **Error! No text of specified style in document.**10 Capaian
Persentase Pemuda Wirausaha Kerah Putih
Kabupaten Sukoharjo 2021 – 2023

Dalam konteks persentase pemuda wirausaha kerah putih, capaian Kabupaten Sukoharjo pada kurun waktu 3 tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2021-2022, capaian indikator ini berada di angka 2 dalam 2 tahun berturut – turut dan kemudian turun pada tahun 2023 berada di angka capaian 1.

Penurunan capaian persentase pemuda wirausaha kerah putih di Kabupaten Sukoharjo mencerminkan tantangan dalam mengembangkan wirausaha muda di sektor profesional dan manajerial, meskipun peran mereka sangat strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Data menunjukkan adanya tren penurunan jumlah pemuda yang terlibat dalam kewirausahaan ini, yang diakibatkan oleh berbagai hambatan, seperti terbatasnya akses terhadap modal dan pelatihan kewirausahaan, ketidaksesuaian keterampilan dengan permintaan pasar, serta kurangnya dukungan ekosistem bisnis yang kondusif. Selain itu, ketidakpastian ekonomi dan tantangan global, termasuk dampak pandemi, turut mempengaruhi stabilitas dan minat pemuda untuk memulai atau mempertahankan usaha. Untuk menanggulangi penurunan ini, diperlukan intervensi kebijakan yang komprehensif, seperti peningkatan akses pelatihan di bidang profesional dan manajerial, serta perluasan akses pembiayaan. Pemerintah daerah dan sektor swasta juga perlu memperkuat kolaborasi guna menciptakan iklim usaha yang ramah serta mendukung inovasi pemuda, khususnya di sektor-sektor dengan potensi pertumbuhan tinggi. Dengan upaya terarah ini, diharapkan persentase pemuda wirausaha kerah putih di Sukoharjo dapat meningkat kembali dan berkontribusi optimal dalam perekonomian lokal serta kesejahteraan masyarakat.

b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda

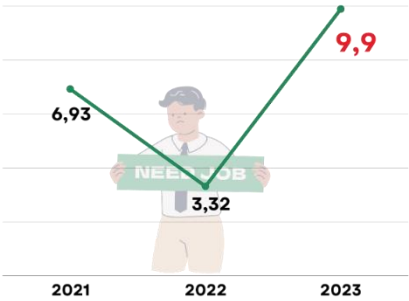
Tingkat pengangguran terbuka adalah indikator penting yang mencerminkan jumlah tenaga kerja yang secara aktif mencari pekerjaan namun belum mendapatkan kesempatan bekerja. Tingkat ini mencerminkan kesehatan ekonomi suatu daerah atau negara, di mana tingginya pengangguran sering kali menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan kerja dan jumlah pencari kerja. Faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi yang melambat, keterbatasan investasi, dan ketidakcocokan antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar menjadi penyebab utama tingginya tingkat pengangguran terbuka.

Pengangguran terbuka (*open unemployment*) didefinisikan sebagai penduduk usia kerja yang tidak bekerja dan sementara tidak bekerja, terdiri dari:

- 1) Mereka yang mencari pekerjaan.
- 2) Mereka yang mempersiapkan usaha.
- 3) Mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
- 4) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja

Dalam konteks pemuda, tingkat pengangguran terbuka seringkali lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya pengalaman kerja, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pelatihan yang relevan, serta persaingan ketat di pasar kerja. Pemuda yang baru lulus pendidikan formal sering kali mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka, sehingga banyak dari mereka yang terjebak dalam siklus pengangguran atau pekerjaan informal dengan upah rendah. Kondisi ini menghambat pertumbuhan ekonomi serta potensi kontribusi mereka terhadap pembangunan sosial dan ekonomi.

Berikut merupakan capaian indikator TPT Pemuda di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 – 2023.



Gambar **Error! No text of specified style in document..11** Capaian TPT Pemuda Kabupaten Sukoharjo 2021 – 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2024

Data grafik di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan angka TPT pemuda Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2023 menjadi 9,9. Pada tahun 2021 – 2022, TPT pemuda Kabupaten Sukoharjo berhasil mengalami penurunan dimana pada tahun 2021 capaiannya berada di angka 6,93 dan kemudian turun menjadi 3,32 pada tahun 2022.

Kenaikan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pemuda di Kabupaten Sukoharjo dalam kurun satu tahun mencerminkan tantangan serius yang dihadapi generasi muda dalam mengakses lapangan kerja yang layak. Sebagai kelompok usia produktif yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi, pemuda justru mengalami peningkatan pengangguran, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara jumlah pencari kerja dan kesempatan kerja yang tersedia. Hal ini juga menyoroti masalah struktural, seperti ketidakcocokan antara keterampilan yang dimiliki pemuda dengan kebutuhan industri, serta keterbatasan lapangan kerja di sektor formal. Selain itu, kenaikan angka TPT ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, seperti perlambatan ekonomi dan dampak jangka panjang dari pandemi, yang mengurangi kapasitas perusahaan untuk menyerap tenaga kerja baru. Perubahan teknologi yang pesat menuntut keterampilan yang lebih tinggi, sementara akses terhadap pendidikan dan pelatihan yang relevan masih terbatas bagi sebagian besar pemuda di Sukoharjo. Akibatnya, banyak pemuda terjebak

dalam pekerjaan informal atau sementara, yang tidak memberikan jaminan sosial atau upah layak, sehingga memperburuk kondisi ekonomi mereka.

Untuk mengatasi kenaikan TPT pemuda ini, pemerintah daerah perlu mengimplementasikan kebijakan yang berfokus pada peningkatan keterampilan dan akses terhadap pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, perluasan akses pembiayaan bagi wirausaha muda serta peningkatan kemitraan dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru sangat diperlukan. Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan angka TPT pemuda di Kabupaten Sukoharjo dapat ditekan, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

c. Capaian Nilai Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024

Domain lapangan dan kesempatan kerja disusun oleh 2 indikator, yaitu:

- 1) Pemuda Wirausaha Kerah Putih
- 2) TPT Pemuda

Berdasarkan perhitungan nilai kedua indikator diatas, maka diperoleh angka capaian domain lapangan dan kesempatan kerja Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel **Error! No text of specified style in document..**4 Hasil Perhitungan Nilai Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja Kabupaten Sukoharjo 2024

	Indikator	Batas Min	Batas Maks	Nilai Indikator	Nilai Domain
X8	Persentase pemuda wirausaha kerah putih	0	2	1	60
X9	TPT pemuda	0	28	9,9	

Sumber: Data Diolah, 2024

Ditinjau berdasarkan hasil perhitungan pada masing – masing indikator pengungkit domain lapangan dan kesempatan kerja Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2024, diperoleh hasil sebesar 60.

4. Domain Partisipasi dan Kepemimpinan

Domain ini melibatkan memberikan kesempatan kepada pemuda untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, berkontribusi dalam pembangunan masyarakat, dan memperoleh keterampilan kepemimpinan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan masa depan. Berikut ini beberapa aspek penting dalam Domain Partisipasi dan Kepemimpinan:

- a) Partisipasi Politik Pembangunan pemuda mencakup keterlibatan pemuda dalam proses politik, termasuk pemilihan umum, debat politik, dan diskusi kebijakan publik. Pemuda harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemilihan politik, menjadi anggota partai politik, atau bahkan terlibat dalam pembentukan kebijakan publik.
- b) Keterlibatan Masyarakat Pemuda perlu didorong dan didukung untuk terlibat dalam kegiatan masyarakat yang bermanfaat, seperti kegiatan

sosial, pelayanan masyarakat, dan proyek lingkungan. Ini membantu pemuda mengembangkan kesadaran sosial, empati, dan tanggung jawab terhadap masyarakat di sekitarnya.

- c) Organisasi Pemuda
Organisasi pemuda memiliki peran penting dalam pembangunan pemuda. Mereka memberikan platform bagi pemuda untuk berorganisasi, berinteraksi dengan sesama pemuda, dan mengembangkan keterampilan kepemimpinan melalui kegiatan seperti pelatihan, program pengembangan diri, dan proyek kolaboratif.
- d) Pemimpin Pemuda
Pembangunan pemuda juga melibatkan pengembangan generasi pemimpin muda yang kompeten dan bertanggung jawab. Ini melibatkan memberikan kesempatan dan dukungan kepada pemuda untuk mengasah keterampilan kepemimpinan, mengambil peran kepemimpinan dalam berbagai konteks, dan mendapatkan mentorship dari pemimpin yang lebih berpengalaman.
- e) Advokasi dan Partisipasi Global
Pemuda dapat berpartisipasi dalam kegiatan advokasi dan gerakan sosial baik di tingkat lokal maupun global. Ini mencakup dukungan untuk pemuda dalam berpartisipasi dalam forum internasional, seperti konferensi, dialog global, dan organisasi pemuda internasional, sehingga mereka dapat memperluas wawasan mereka dan mempengaruhi isu-isu global.

- a. Persentase Pemuda yang Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan
Indikator persentase pemuda yang berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan menggambarkan seberapa aktif pemuda dalam kegiatan yang berhubungan dengan sosial di lingkungan sekitarnya dalam tiga bulan terakhir. Indikator ini bertujuan untuk menilai tingkat kepedulian pemuda terhadap aktivitas sosial di Kabupaten Sukoharjo.
Setelah dilakukan proses penyebaran kuesioner, maka didapatkan data mengenai indikator persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut

Tabel **Error! No text of specified style in document..**5 Rincian Klaster Pemuda yang Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Sukoharjo

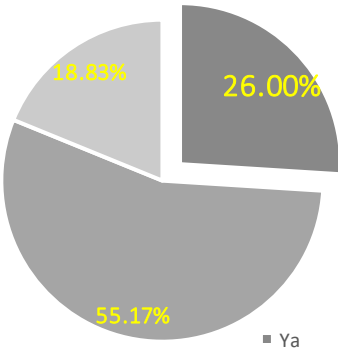
No	Jawaban Responden	Klaster Pemuda				Jumlah	Mean	Standard Error	Standard Deviation
		SMA / Sdrjt / PT	Karang Taruna	KNPI	Umum				
1	Ya	73	50	32	40	195	48,75	8,87	17,76
2	Tidak	293	86	6	28	413			
3	Tidak, Karena Tidak Ada Kegiatan	111	23	1	6	141			
TOTAL		477	159	39	74	749			

Sumber: Tim Penyusun, 2024

Hasil analisis statistik terhadap indikator partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial memberikan informasi penting terkait distribusi data. Rata-rata (mean) sebesar 48,75 menunjukkan nilai tengah dari seluruh data yang

dikumpulkan, yang mengindikasikan bahwa secara umum tingkat kesadaran sosial pemuda di Kabupaten Sukoharjo berada pada tingkat sedang. Selain itu, standar deviasi sebesar 17,76 menunjukkan persebaran data yang cukup merata karena berada di bawah nilai rata-rata. Dengan standar error sebesar 8,87, dapat disimpulkan bahwa rentang nilai yang cukup lebar mencerminkan adanya perbedaan tingkat kepedulian, di mana sebagian pemuda sangat peduli terhadap kegiatan sosial, sementara yang lainnya kurang terlibat.

Ditinjau berdasarkan perhitungan hasil sebaran kuesioner tentang partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial di Kabupaten Sukoharjo, terdapat 195 responden yang menjawab ya dengan arti bahwa terdapat 195 pemuda (26% dari 749) yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Sukoharjo. Selanjutnya, angka ini juga mengindikasikan bahwa banyak pemuda di Kabupaten Sukoharjo yang tidak mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir.



Gambar **Error! No text of specified style in document..**12 Capaian
Persentase Pemuda yang
Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan
Sumber: Data Diolah, 2024

- b. Persentase Pemuda yang Aktif Dalam Kegiatan Organisasi
- Indikator persentase pemuda yang terlibat dalam kegiatan organisasi dengan struktur keanggotaan, kepengurusan, dan aturan yang jelas, di luar lingkungan kerja dan sekolah, selama tiga bulan terakhir, bertujuan untuk mengukur tingkat keaktifan pemuda dalam berorganisasi. Indikator ini memberikan gambaran mengenai seberapa banyak pemuda di Kabupaten Sukoharjo yang berpartisipasi aktif dalam organisasi non-formal, seperti kelompok pemuda, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas lainnya, di luar peran mereka di tempat kerja atau institusi pendidikan. Melalui indikator ini, diharapkan dapat dilihat sejauh mana pemuda terlibat dalam pengembangan keterampilan kepemimpinan, kerjasama tim, dan peningkatan kapasitas diri melalui kegiatan di luar rutinitas sehari-hari. Partisipasi dalam organisasi juga dianggap penting dalam membentuk karakter pemuda yang lebih tangguh, berdaya saing, dan memiliki kemampuan sosial yang baik.
- Berikut merupakan data hasil penyebaran kuesioner yang menunjukkan gambaran indikator persentase pemuda yang aktif dalam kegiatan organisasi di Kabupaten Sukoharjo.

Tabel **Error! No text of specified style in document..**6 Rincian Klaster Pemuda yang Aktif Dalam Kegiatan Organisasi

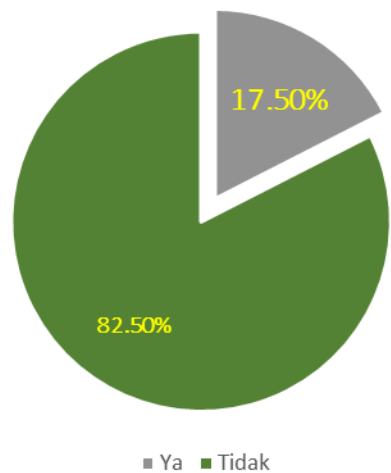
No	Jawaban	Klaster Pemuda	Jumlah	Mean	Standard	Standard
----	---------	----------------	--------	------	----------	----------

	Responden	SMA / Sdrjt / PT	Karang Taruna	KNPI	Umum			Error	Deviation
1	Ya	46	35	23	28	132	33	4,98	9,96
2	Tidak	431	124	16	46	617			
TOTAL		477	159	39	74	749			

Sumber: Tim Penyusun, 2024

Hasil analisis statistik terhadap indikator persentase pemuda yang aktif dalam kegiatan organisasi menunjukkan nilai rata-rata (mean) sebesar 33, yang menandakan bahwa sebagian besar data berada di sekitar angka tersebut. Standar deviasi sebesar 9,96 menggambarkan seberapa tersebar data di sekitar rata-rata, dengan menunjukkan bahwa persebarannya relatif rendah dibandingkan nilai rata-rata. Sementara itu, standar error sebesar 4,98, bila dikombinasikan dengan standar deviasi, menunjukkan bahwa estimasi rata-rata masih bisa digunakan sebagai representasi umum dari data, meskipun terdapat tingkat ketidakpastian tertentu.

Hasil mengenai angka capaian indikator persentase pemuda yang aktif dalam kegiatan organisasi didapatkan berdasarkan pada responden yang menjawab “Ya” pada kuesioner. Ditinjau pada rincian tabel di atas, untuk jawaban responden “Ya” memiliki jumlah sebesar 132 atau setara dengan 17,5% dari total 749 responden. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari 50% pemuda di Kabupaten Sukoharjo tidak aktif dalam kegiatan organisasi.



Gambar **Error! No text of specified style in document..13** Capaian Persentase Pemuda yang Aktif Dalam Kegiatan Organisasi
Sumber: Data Diolah, 2024

Rendahnya partisipasi pemuda dalam kegiatan organisasi menjadi perhatian serius karena menunjukkan kurangnya keterlibatan generasi muda dalam pengembangan keterampilan sosial, kepemimpinan, dan kolaborasi. Organisasi, baik di tingkat komunitas maupun lebih luas, berperan penting dalam membentuk karakter dan meningkatkan kemampuan pemuda dalam bekerja sama, mengambil keputusan, serta menghadapi tantangan secara kolektif. Ketidakterlibatan ini mencerminkan adanya kesenjangan dalam memanfaatkan potensi pemuda sebagai agen perubahan di masyarakat.

Untuk meningkatkan partisipasi pemuda, diperlukan strategi yang lebih inklusif dan relevan dengan kehidupan mereka. Penyediaan program yang sesuai dengan minat pemuda, peningkatan akses informasi, serta dukungan aktif dari pemerintah, lembaga pendidikan,

dan organisasi masyarakat dapat mendorong keterlibatan yang lebih tinggi. Dengan partisipasi yang lebih aktif, pemuda memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan utama dalam memperkuat solidaritas sosial dan memajukan komunitas mereka.

- c. Persentase Pemuda yang Memberikan Saran/Pendapat dalam Rapat
- Indikator ini mengukur persentase pemuda yang dalam setahun terakhir pernah mengikuti pertemuan atau rapat di lingkungan sekitar dan turut memberikan saran atau pendapat. Tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana pemuda berpartisipasi aktif dalam menyampaikan pemikiran atau ide mereka selama kegiatan rapat atau pertemuan di Kabupaten Sukoharjo.
- Berikut merupakan data hasil penyebaran kuesioner yang menunjukkan gambaran indikator persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat di Kabupaten Sukoharjo.

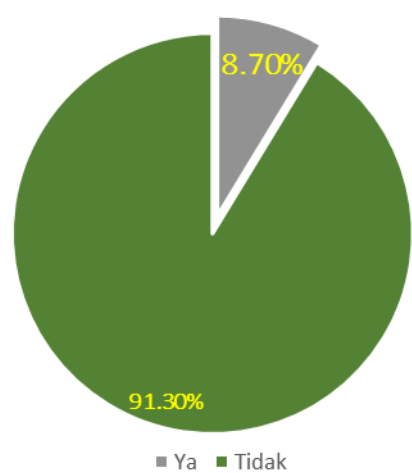
Tabel **Error! No text of specified style in document..**7 Rincian Klaster Pemuda yang Memberikan Saran/Pendapat dalam Rapat

No	Jawaban Responden	Klaster Pemuda				Jumlah	Mean	Standard Error	Standard Deviation
		SMA / Sdrjt / PT	Karang Taruna	KNPI	Umum				
1	Ya	23	15	13	14	65	16,25	2,28	4,57
2	Tidak	454	144	26	60	684			
TOTAL		477	159	39	74	749			

Sumber: Tim Penyusun, 2024

Hasil analisis statistik terhadap persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat menunjukkan bahwa nilai rata-rata (*mean*) sebesar 16,25, dan ketika dikaitkan dengan standar deviasi sebesar 4,57 yang relatif kecil dibandingkan rata-rata, ini menunjukkan bahwa data cenderung terkonsentrasi di sekitar nilai rata-rata, dengan variasi antar nilai yang tidak terlalu besar. Standar error sebesar 2,28, yang lebih kecil dari standar deviasi, menunjukkan bahwa estimasi rata-rata cukup akurat dengan tingkat ketidakpastian yang rendah. Hal ini berarti rata-rata tersebut dapat diandalkan sebagai representasi keseluruhan data, meskipun masih ada sedikit variasi.

Telaah terhadap capaian indikator ini dianalisis berdasarkan pada hasil kuesioner yang menjawab “Ya”. Dari total 749 responden yang menjadi objek, terdapat 65 (8,7%) pemuda yang memiliki pengalaman memberikan pendapat / saran di dalam forum rapat. Hal ini mengindikasikan bahwa lebih dari 90% pemuda Kabupaten Sukoharjo belum pernah memberikan saran maupun pendapatnya selama kegiatan rapat.



Gambar **Error! No text of specified style in document..14** Capaian Persentase Pemuda yang Memberikan Saran/Pendapat Dalam Rapat
Sumber: Data Diolah, 2024

Rendahnya minat pemuda untuk memberikan saran atau pendapat dalam rapat menjadi masalah yang perlu diperhatikan, karena partisipasi aktif dalam diskusi merupakan elemen penting dalam pengembangan kepemimpinan, komunikasi, dan tanggung jawab sosial. Ketidakaktifan pemuda dalam menyampaikan ide selama rapat menunjukkan adanya hambatan dalam keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan di komunitas. Hal ini tidak hanya berdampak pada minimnya representasi pemuda dalam penyelesaian masalah bersama, tetapi juga menghambat pengembangan kemampuan berpikir kritis dan rasa percaya diri mereka.

Untuk mengatasi rendahnya minat tersebut, diperlukan perubahan pendekatan yang lebih mendukung partisipasi pemuda. Pendidikan yang lebih fokus pada pengembangan keterampilan berpikir kritis dan komunikasi harus ditingkatkan, serta lingkungan yang lebih inklusif dan terbuka perlu diciptakan. Mendorong pemuda untuk aktif terlibat dalam pengambilan keputusan serta memberikan mereka ruang yang bebas dan aman untuk menyampaikan pandangan merupakan langkah penting dalam meningkatkan partisipasi mereka, sehingga memperkuat peran pemuda dalam pembangunan masyarakat.

d. Capaian Nilai Domain Partisipasi dan Kepemimpinan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024

Nilai domain partisipasi dan kepemimpinan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 didapatkan berdasarkan dari hasil perhitungan pada masing-masing indikator pengungkitnya. Hasil ini nantinya akan menggambarkan kondisi aspek keterlibatan pemuda di dalam kegiatan bermasyarakat dan juga aspek keaktifan dan *leadership* didalam sebuah organisasi maupun forum.

Berikut merupakan nilai capaian domain Partisipasi dan Kepemimpinan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024.

Tabel **Error! No text of specified style in document..8** Hasil Perhitungan Nilai Domain Partisipasi dan Kepemimpinan Kabupaten Sukoharjo 2024

	Indikator	Batas Min	Batas Maks	Nilai Indikator	Nilai Domain
X10	Persentase	0	100	26	36,67

	Indikator	Batas Min	Batas Maks	Nilai Indikator	Nilai Domain
	pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan				
X11	Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi	0	45	17,5	
X12	Persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat	0	25	8,7	

Sumber: Data Diolah, 2024

Berdasarkan perhitungan indikator penyusun domain partisipasi dan kepemimpinan di Kabupaten Sukoharjo, didapatkan angka capaian nilai domain sebesar 36,67. Perolehan nilai ini apabila dibandingkan dengan tingkat capaian domain pada tahun 2023, maka terlihat terjadi penurunan yang cukup signifikan dimana pada tahun 2023 angka capaian domain ini adalah sebesar 97,45.

5. Domain Gender dan Diskriminasi

Isu strategis nasional terkait dengan domain gender dan diskriminasi terletak pada perkawinan usia anak. Isu tersebut memiliki konsekuensi pada terjadinya kasus anak bawah lima tahun (balita) yang mengalami stunting. Terdapat korelasi positif antara proporsi pemuda perempuan berusia 20–24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun dan prevalensi stunting pada balita. Hal ini berarti bahwa prevalensi stunting cenderung lebih tinggi di provinsi-provinsi dengan angka perkawinan usia anak yang juga tinggi. Salah satu penjelasannya adalah bahwa perempuan yang hamil pada usia remaja berisiko melahirkan bayi dengan permasalahan gizi. Perempuan kelompok usia 15–24 tahun memiliki risiko yang lebih tinggi atau lebih rentan mengalami anemia dan kekurangan energi kronis (KEK).

Salah satu hal yang dapat menjelaskan variasi tingkat perkawinan usia anak adalah perbedaan tingkat pendidikan antarprovinsi yang ditunjukkan oleh rata-rata lama sekolah. Adanya korelasi negatif antara rata-rata lama sekolah dan angka perkawinan usia anak. Korelasi negatif tersebut mengindikasikan bahwa provinsi dengan tingkat pendidikan rata-rata pemuda yang lebih tinggi memiliki angka perkawinan usia anak yang relatif lebih rendah. Pemuda dengan rata-rata lama sekolah lebih tinggi adalah mereka yang menempuh pendidikan lebih lama dan mendapatkan hasil pembelajaran lebih banyak daripada pemuda dengan rata-rata lama sekolah lebih rendah. Secara rata-rata, pemuda dengan tingkat pendidikan lebih rendah menikah pertama kali pada usia yang lebih muda daripada pemuda dengan tingkat pendidikan lebih tinggi. Hal ini berarti bahwa pendidikan mencegah pernikahan pada usia muda yang berimplikasi pada menurunnya risiko kehamilan pada usia muda dan bayi yang lahir dengan permasalahan gizi. Dengan demikian, secara tidak langsung peningkatan capaian domain pendidikan diharapkan dapat mencegah permasalahan stunting di Indonesia.

Dalam konteks ini, pengukuran Indeks Pemberdayaan Perempuan (IPP) melibatkan domain gender dan diskriminasi, yang mencakup sub-domain

yang krusial, seperti angka pernikahan usia dini, persentase perempuan muda yang melanjutkan pendidikan di tingkat menengah dan tinggi, serta persentase perempuan muda yang bekerja di sektor formal. Mengurangi angka pernikahan usia dini sangat penting, karena hal ini tidak hanya melindungi hak-hak anak perempuan, tetapi juga memastikan bahwa mereka memiliki kesempatan untuk mengejar pendidikan dan mengembangkan diri.

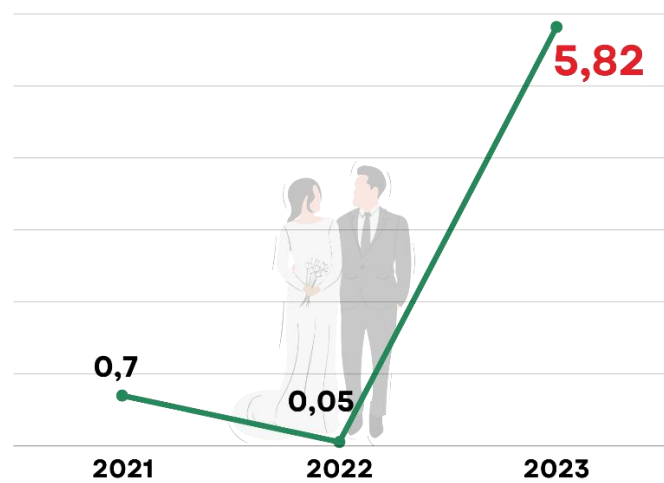
Untuk dapat mengidentifikasi mengenai gambaran domain gender dan diskriminasi di Kabupaten Sukoharjo, berikut adalah hasil perhitungan masing – masing indikator penyusun yang ada di dalam Domain Gender dan Diskriminasi di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024.

a. Angka Perkawinan Usia Anak

Masalah strategis nasional yang berkaitan dengan gender dan diskriminasi menyoroti praktik pernikahan usia dini, yang memiliki dampak signifikan terhadap kasus stunting pada anak-anak di bawah lima tahun. Terdapat hubungan positif antara proporsi wanita muda berusia 20–24 tahun yang menikah sebelum mencapai usia 18 tahun dengan prevalensi stunting di kalangan balita. Ini menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat pernikahan anak yang tinggi cenderung memiliki tingkat stunting yang lebih tinggi pula. Salah satu faktor penyebabnya adalah risiko kesehatan yang dihadapi perempuan yang hamil di usia muda, yang berpotensi melahirkan bayi dengan masalah gizi. Wanita dalam rentang usia 15–24 tahun juga lebih rentan terhadap anemia dan kekurangan energi kronis (KEK).

Perbedaan dalam tingkat pernikahan usia anak dapat dijelaskan oleh variasi tingkat pendidikan antarprovinsi, yang tercermin dalam rata-rata lama sekolah. Terdapat korelasi negatif antara rata-rata lama sekolah dengan angka pernikahan anak, yang berarti provinsi yang memiliki pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki angka pernikahan anak yang lebih rendah. Remaja dengan rata-rata lama sekolah yang lebih tinggi biasanya menyelesaikan pendidikan mereka lebih lama dan memiliki pengetahuan yang lebih luas dibandingkan mereka yang memiliki tingkat pendidikan lebih rendah. Secara umum, remaja dengan pendidikan yang lebih rendah cenderung menikah lebih muda dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang berpendidikan lebih tinggi. Peningkatan kualitas pendidikan dapat membantu mencegah pernikahan dini, yang pada gilirannya mengurangi risiko kehamilan yang tidak diinginkan dan masalah gizi pada bayi. Oleh karena itu, peningkatan capaian di bidang pendidikan diharapkan dapat berkontribusi terhadap upaya pencegahan stunting di Indonesia.

Selanjutnya, berikut adalah data mengenai angka pernikahan anak di Kabupaten Sukoharjo untuk periode tahun 2021 hingga 2023.



Gambar **Error! No text of specified style in document..**15 Capaian Angka Perkawinan Usia Anak Kabupaten Sukoharjo 2021 – 2023
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2024

Ditinjau berdasarkan gambaran grafik angka perkawinan usia anak Kabupaten Sukoharjo di atas, terjadi kenaikan angka perkawinan anak pada tahun 2023. Pada tahun 2021, angka perkawinan anak di Kabupaten Sukoharjo sebesar 0,7 yang kemudian turun menjadi 0,05 pada tahun 2022. Selanjutnya pada tahun 2023 terjadi kenaikan yang cukup drastis pada indikator angka perkawinan anak hingga mencapai 5,82.

Kenaikan angka perkawinan usia anak di Kabupaten Sukoharjo menjadi isu serius yang mengkhawatirkan, terutama ketika dikaitkan dengan berbagai tantangan sosial-ekonomi di lapangan. Fenomena ini mencerminkan permasalahan mendasar seperti kemiskinan, rendahnya akses terhadap pendidikan, dan kuatnya tekanan budaya yang menempatkan perempuan muda pada peran tradisional. Di beberapa wilayah, pernikahan dini sering dilihat sebagai solusi untuk meringankan beban ekonomi keluarga atau sebagai cara untuk memenuhi norma sosial yang berlaku.

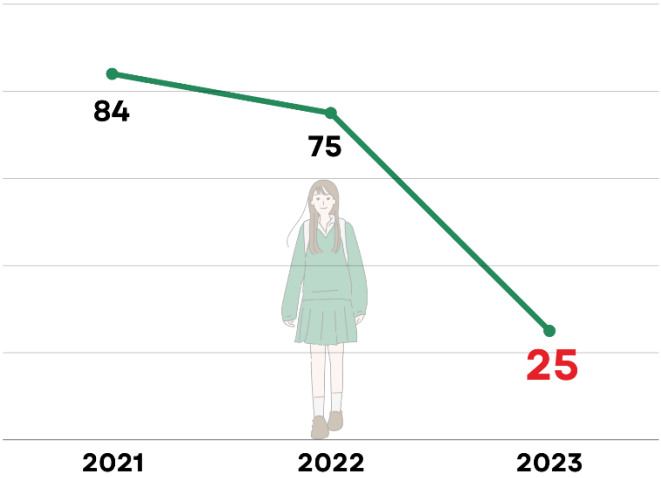
Dampak jangka panjang dari kenaikan angka perkawinan usia anak sangat signifikan, terutama terhadap kesehatan ibu dan anak. Pernikahan dini biasanya diikuti oleh kehamilan remaja, yang meningkatkan risiko masalah gizi, kesehatan ibu, serta stunting pada anak. Kondisi ini menambah tekanan pada sektor kesehatan di Sukoharjo, yang harus menghadapi konsekuensi dari praktik pernikahan usia dini. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan intervensi yang komprehensif, termasuk peningkatan akses pendidikan, penyuluhan mengenai risiko pernikahan dini, dan pemberdayaan ekonomi perempuan muda agar mereka memiliki pilihan hidup yang lebih baik dan lebih berdaya.

b. Persentase Pemuda Perempuan yang Sedang Menempuh Pendidikan Menengah dan Tinggi

Persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan menengah dan tinggi merupakan indikator kunci dalam pembangunan pemuda. Data ini mencerminkan tingkat keterlibatan dan akses pemuda perempuan terhadap pendidikan lanjutan. Semakin banyak pemuda perempuan yang melanjutkan ke pendidikan tinggi, semakin besar peluang mereka untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang lebih mendalam, yang dapat diterapkan dalam berbagai bidang. Selain itu, hal ini juga memperkuat kapasitas mereka untuk berperan aktif

dalam kegiatan ekonomi, ilmiah, dan sosial, sekaligus memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan masyarakat.

Berikut merupakan gambaran capaian indikator Persentase Pemuda Perempuan yang Sedang Menempuh Pendidikan Menengah dan Tinggi di Kabupaten Sukoharjo.



Gambar **Error! No text of specified style in document..**16 Capaian Persentase Pemuda Perempuan Yang Sedang Menempuh Pendidikan Menengah dan Tinggi Kabupaten Sukoharjo 2021 – 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2024

Berdasarkan gambaran grafik mengenai indikator Persentase Pemuda Perempuan yang Sedang Menempuh Pendidikan Menengah dan Tinggi di atas, didapatkan gambaran bahwa dalam 3 tahun terakhir capaian indikator ini mengalami tren penurunan. Hal ini tergambarkan di dalam grafik dimana pada tahun 2021, capaian indikator ini berada di angka 84 kemudian turun menjadi 75 pada tahun 2022 dan turun semakin jauh di angka 25 pada tahun 2023.

Tren penurunan persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan menengah dan tinggi di Kabupaten Sukoharjo perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah. Fenomena ini mencerminkan berbagai tantangan yang dihadapi pemuda perempuan dalam mengakses pendidikan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya. Faktor-faktor seperti kesulitan finansial, minimnya dukungan keluarga, dan tekanan tradisi yang lebih mengutamakan pernikahan dini atau tanggung jawab rumah tangga dibandingkan melanjutkan pendidikan menjadi penyebab utama penurunan tersebut.

Penurunan jumlah pemuda perempuan yang melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah dan tinggi memiliki dampak signifikan terhadap potensi peningkatan keterampilan dan kompetensi mereka, yang sangat diperlukan di pasar kerja. Hal ini juga berakibat pada menurunnya partisipasi mereka di sektor-sektor yang memerlukan keahlian khusus, yang pada akhirnya dapat memengaruhi daya saing daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, langkah strategis sangat dibutuhkan, seperti peningkatan akses beasiswa, penguatan dukungan dari sekolah dan masyarakat, serta kampanye kesadaran tentang pentingnya pendidikan sebagai pilar utama dalam pembangunan daerah.

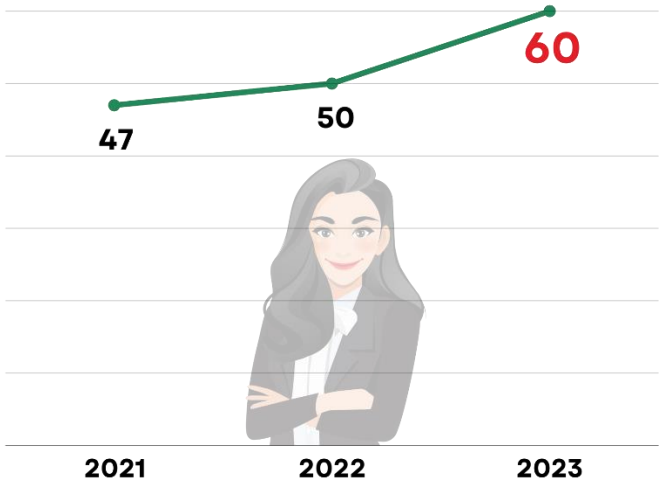
c. Persentase Pemuda Perempuan yang Bekerja Di Sektor Formal

Pembangunan sumber daya manusia dengan pendekatan berbasis gender bertujuan untuk memastikan perlindungan hak-hak perempuan dan anak-anak dari diskriminasi, kekerasan, serta eksploitasi yang mungkin mereka alami dalam berbagai aspek kehidupan. Selain memberikan perlindungan, pendekatan ini juga berfokus pada

peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak-anak guna memperkuat ketahanan sosial dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Ketika perempuan dan anak-anak diberikan kesempatan yang setara dan akses yang memadai, mereka dapat berperan aktif dalam pembangunan, baik di tingkat keluarga maupun masyarakat.

Dalam konteks dunia kerja, kontribusi perempuan menjadi semakin nyata dengan partisipasi mereka yang aktif, baik di lembaga pemerintah maupun di sektor swasta. Keterlibatan ini mencerminkan pencapaian penting dalam kesetaraan gender dan menjadi indikator utama dalam menilai peran perempuan di ranah sosial dan ekonomi. Meningkatnya partisipasi perempuan di dunia kerja juga membawa dampak positif pada peningkatan produktivitas, inovasi, serta keberagaman perspektif dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, upaya terus-menerus untuk mendukung perempuan agar lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai bidang akan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Berikut merupakan capaian Persentase Pemuda Perempuan yang Bekerja di Sektor Formal di Kabupaten Sukoharjo pada kurun 2021 – 2023.



Gambar **Error! No text of specified style in document..17** Capaian Persentase Pemuda Perempuan yang Bekerja Di Sektor Formal Kabupaten Sukoharjo 2021 – 2023
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2024

Data capaian persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal di atas menunjukkan adanya tren kenaikan yang positif dimana dalam rentang 3 tahun terakhir terjadi kenaikan angka capaian sebesar 13 poin. Pada tahun 2021, capaian indikator ini berada di angka 47 dan kemudian terus mengalami kenaikan hingga pada 2023 dapat memperoleh angka capaian sebesar 60.

Kenaikan capaian persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal di Kabupaten Sukoharjo merupakan perkembangan positif yang mencerminkan peningkatan akses dan keterlibatan perempuan muda dalam dunia kerja yang lebih stabil dan terstruktur. Pekerjaan di sektor formal tidak hanya memberikan upah yang lebih terjamin, tetapi juga membuka peluang bagi pemuda perempuan untuk mendapatkan jaminan sosial, pelatihan, serta kesempatan untuk mengembangkan karier di berbagai bidang profesional.

Kenaikan ini juga menandakan adanya pergeseran positif dalam pandangan masyarakat mengenai peran perempuan dalam dunia kerja, serta adanya dukungan yang lebih baik dari keluarga, pendidikan, dan pemerintah daerah. Pemuda perempuan yang terlibat di sektor formal

dapat berkontribusi lebih besar terhadap ekonomi lokal, meningkatkan daya saing daerah, serta menjadi teladan bagi generasi berikutnya.

d. Capaian Nilai Domain Gender dan Diskriminasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024

Perhitungan angka capaian domain gender dan diskriminasi di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2024 ini ditentukan oleh hasil perhitungan ketiga indikator pengungkutnya yaitu:

- 1) Angka Perkawinan Usia Anak
- 2) Persentase Pemuda Perempuan yang Menempuh Pendidikan Menengah dan Tinggi
- 3) Persentase Pemuda Perempuan yang Bekerja Di Sektor Formal

Nilai dari ketiga indikator tersebut kemudian diakumulasi sehingga menghasilkan nilai domain kelima penyusun IPP Kabupaten Sukoharjo ini.

Adapun berikut merupakan hasil perhitungan capaian domain Gender dan Diskriminasi Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2024.

Tabel **Error! No text of specified style in document..9** Hasil Perhitungan Nilai Domain Gender dan Diskriminasi Kabupaten Sukoharjo 2024

	Indikator	Batas Min	Batas Maks	Nilai Indikator	Nilai Domain
X10	Angka perkawinan usia anak	0	45	5,82	66,67
X11	Persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan menengah dan tinggi	0	100	25	
X12	Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal	0	60	60	

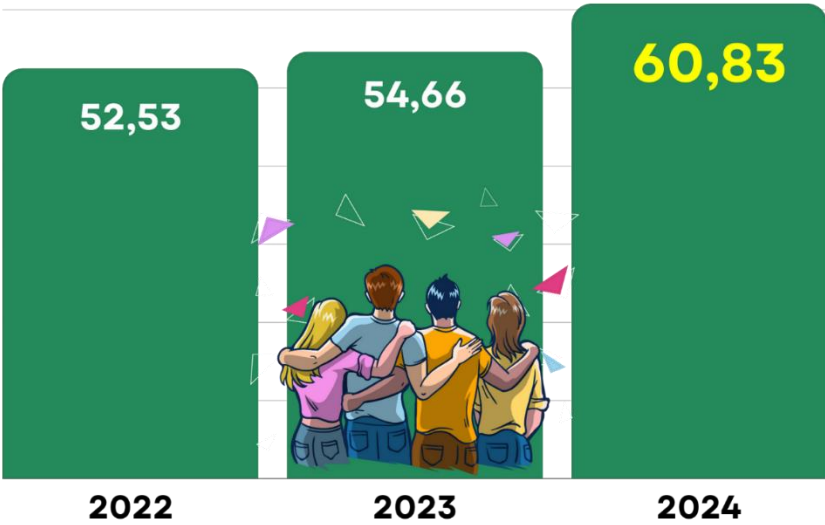
Sumber: Data Diolah, 2024

Pada tahun 2024 ini, Kabupaten Sukoharjo berhasil mencapai nilai domain gender dan dikriminasi sebesar 66,67. Telaah lebihh lanjut kemudian didasarkan pada perbandingan capaian pada tahun 2023 dan tahun 2024 dimana pada tahun 2023 lalu capaian domain ini berada di angka 53,33.

D. Isu Strategis Kepemudaan Kabupaten Sukoharjo Secara Existing

Ditinjau berdasarkan hasil perhitungan IPP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 di atas, diperoleh skor IPP Kabupaten sebesar 60,83. Capaian nilai IPP Kabupaten Sukoharjo ini tentunya didapatkan berdasarkan perhitungan dari masing – masing domain penyusun dengan kontribusi terbesar sebagai penyumbang nilai terbesar adalah Domain Pendidikan dengan capaian nilai sebesar 73,33.

Perolehan nilai ini juga menunjukkan bahwa nilai IPP Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan dari capaian tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 capaian nilai IPP Kabupaten Sukoharjo adalah sebesar 52,53 kemudian naik menjadi 54,66 pada tahun 2023 dan terus mengalami kenaikan menjadi 60,83 pada tahun 2024.

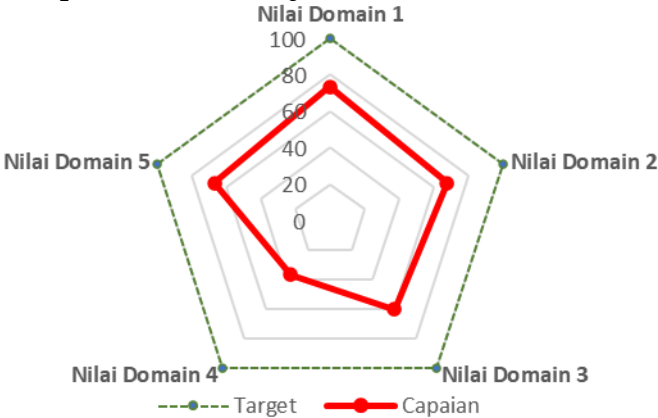


Gambar **Error! No text of specified style in document..18** Nilai IPP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 – 2024
Sumber: Data Diolah, 2024

Tren peningkatan angka capaian IPP Kabupaten Sukoharjo selama 3 tahun berturut – turut ini merupakan sebuah pencapaian yang positif yang menjadi tolok ukur kinerja bidang kepemudaan di Kabupaten Sukoharjo khususnya pada aspek pembangunan pemuda. Peningkatan capaian IPP ini juga mencerminkan upaya pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan pemuda.

Secara keseluruhan, kenaikan capaian nilai Indeks Pembangunan Pemuda di Kabupaten Sukoharjo merupakan tanda bahwa berbagai upaya untuk memberdayakan pemuda sedang membuahkan hasil. Dengan adanya investasi yang berkelanjutan dalam pendidikan, kesehatan, dan partisipasi sosial, pemuda di Sukoharjo diharapkan dapat menjadi generasi yang lebih berdaya saing, inovatif, dan siap menghadapi tantangan di masa depan, serta berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan daerah dan bangsa.

Namun selain pencapaian yang positif pada nilai IPP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024, diperlukan adanya upaya komprehensif terkait dengan capaian domain yang masih memerlukan peningkatan dan penguatan capaian. Adapun gambaran kontribusi perdomain pada capaian IPP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 adalah sebagai berikut.



Gambar **Error! No text of specified style in document..19** Distribusi Capaian Perdomain IPP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024

Sumber: Data Diolah, 2024

Berdasarkan grafik distribusi capaian domain IPP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 di atas, didapatkan informasi bahwa domain yang memiliki capaian terendah dan perlu adanya upaya peningkatan dan penguatan adalah Domain Partisipasi dan Kepemimpinan. Oleh karenanya secara agregat Partisipasi dan Kepemimpinan menjadi isu strategis yang fundamental di Kabupaten Sukoharjo.

Berangkat dari permasalahan ini, salah satu langkah awal yang diambil adalah dengan menciptakan ruang-ruang bagi pemuda untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, politik, dan ekonomi. Melalui program-program pemberdayaan, pemuda diberikan kesempatan untuk terlibat dalam organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, serta forum-forum diskusi yang membahas isu-isu yang relevan dengan kehidupan mereka. Kegiatan seperti pelatihan kepemimpinan, seminar, dan lokakarya diadakan untuk membekali pemuda dengan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi pemimpin yang efektif. Selain itu diperlukan adanya upaya antara pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo yang dalam hal ini dimotori oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata untuk dapat bersinergi serta berkolaborasi aktif dengan KNPI maupun OKP lainnya yang ada di wilayah kabupaten.

1. Domain Pendidikan

Pembangunan pendidikan merupakan faktor yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia. Dalam upaya pembangunan pendidikan di Kabupaten Sukoharjo, masih ada beberapa permasalahan yang memerlukan penanganan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya siswa yang putus sekolah
- b. Masih rendahnya kompetensi tenaga pendidik
- c. Masih terdapat sarana prasarana Pendidikan dalam kondisi rusak
- d. Domain Kesehatan dan Kesejahteraan

Pembangunan Kesehatan dan Kesejahteraan juga merupakan faktor yang mendukung pembangunan sumberdaya manusia. Pembangunan Kesehatan dan Kesejahteraan dilaksanakan untuk meningkatkan derajat Kesehatan dan Kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dan Kesejahteraan masih ada beberapa permasalahan antara lain:

- a. Masih ditemukannya kematian ibu dan bayi
- b. Belum optimalnya Penemuan dan pelayanan kasus penyakit menular dan tidak menular.
- c. Belum optimalnya mutu pelayanan fasilitas kesehatan pertama dan rujukan
- d. Masih adanya PPKS yang memerlukan intervensi
- e. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi individu miskin absolut dan kelompok rentan
- f. Belum optimalnya penyediaan bantuan sosial
- g. Belum optimalnya validasi pendataan disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis
- h. Belum optimalnya perlindungan sosial pasca bencana alam dan sosial.
- i. Belum Optimalnya Pelaksanaan KIE pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya loka
- j. Belum optimalnya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

2. Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja

Pembangunan Ketenagakerjaan merupakan salah satu factor keberhasilan Pembangunan di Kabupaten Sukoharjo, masih ada beberapa permasalahan yang memerlukan penanganan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan perencanaan tenaga kerja belum optimal
- b. Mutu tenaga kerja yang relatif rendah
- c. Kurangnya akses tenaga kerja pada pasar kerja
- d. Kurangnya perlindungan tenaga kerja dalam Hubungan Industrial.

3. Domain Partisipasi dan Kepemimpinan

Pembangunan sumber daya manusia berperspektif gender dilaksanakan untuk menjamin dan melindungi hak perempuan dan anak terhadap diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi dalam kehidupan. Dalam pelaksanaannya, masih ada permasalahan yanperlu perhatian antara lain:

- a. Belum optimalnya Upaya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
- b. Belum optimalnya peran organisasi kepemudaan yang aktif dalam pembinaan perilaku generasi muda.
- c. kegiatan dan anggaran kepemudaan yang belum signifikan
- d. Belum menguatnya gerakan Pemuda Pelopor dalam menunjang Program Daya Saing Pemuda

4. Domain Gender dan Diskriminasi

Pembangunan sumber daya manusia berperspektif gender dilaksanakan untuk menjamin dan melindungi hak perempuan dan anak terhadap diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi dalam kehidupan. Dalam pelaksanaannya, masih ada permasalahan yanperlu perhatian antara lain:

- a. Belum menguatnya Pangarusutamaan Gender sebagai Isu Pembangunan
- b. Belum optimalnya partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomdan politik
- c. Belum optimalnya upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan
- d. Masih terbatasnya pemahaman bahaya kekerasan kepada anak

Dirujuk bedasarkan pada Dokumen Laporan Kinerja Disporapar Kabupaten Sukoharjo pada Tahun 2023, bahwa terdapat permasalahan eksisting berkenaan dengan sektor kepemudaan di lingkup wilayah Kabupaten Sukoharjo. Isu strategis tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelayanan di bidang kepemudaan dan keolahragaan kepada masyarakat;
2. Belum optimalnya pembinaan pemuda dan Organisasi Kepemudaan;
3. Kurang tertanamnya jiwa wirausaha dan aksesibilitas usaha dikalangan pemuda

BAB II ARAH DAN STRATEGI

Arah pembangunan kepemudaan di Kabupaten Sukoharjo ditujukan pada upaya memperkuat kualitas sumber daya pemuda secara menyeluruh, baik dari aspek pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, partisipasi sosial dan politik, maupun kesetaraan gender. Pemuda diharapkan mampu berkembang menjadi generasi yang cerdas, sehat, produktif, berkarakter, serta memiliki kesadaran kebangsaan yang tinggi. Dengan demikian, arah pembangunan kepemudaan ini sejalan dengan mandat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Untuk mencapai arah pembangunan tersebut, ditetapkan strategi pembangunan kepemudaan sebagai berikut:

1. Optimalisasi layanan pendidikan bagi pemuda melalui peningkatan akses, mutu, dan pemerataan pendidikan, baik formal maupun nonformal, serta penguatan kapasitas literasi, keterampilan, dan kreativitas pemuda sesuai kebutuhan zaman.
2. Peningkatan pemenuhan layanan kesehatan dan kesejahteraan pemuda melalui penyediaan layanan kesehatan yang terjangkau, edukasi kesehatan mental dan reproduksi, serta upaya preventif terhadap perilaku berisiko, sehingga pemuda mampu tumbuh sehat, tangguh, dan sejahtera.
3. Penciptaan peluang dan kesempatan kerja yang inklusif bagi pemuda, antara lain melalui program kewirausahaan muda, peningkatan keterampilan kerja, pemagangan, serta penyediaan akses terhadap sumber permodalan dan dunia usaha, sehingga pemuda dapat berperan sebagai pelaku ekonomi produktif.
4. Peningkatan partisipasi, kapasitas, dan kepemimpinan pemuda dalam berbagai bidang pembangunan daerah, melalui fasilitasi organisasi kepemudaan, pelatihan kepemimpinan, serta peningkatan keterlibatan pemuda dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan.
5. Pengarusutamaan gender dan penguatan nilai-nilai kesetaraan sosial dalam kepemudaan, dengan memastikan pemuda perempuan memperoleh akses yang setara dalam pendidikan, pekerjaan, kepemimpinan, serta terbebas dari diskriminasi, kekerasan, dan perkawinan usia anak.

BAB III
SASARAN DAN TARGET

I. SASARAN DAN TARGET

Sejalan dengan arah dan strategi yang telah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo juga menetapkan sasaran pembangunan kepemudaan, yaitu meningkatnya kualitas dan peran pemuda dalam pembangunan daerah yang tercermin melalui peningkatan nilai Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Sasaran ini diturunkan ke dalam target capaian IPP yang terukur secara bertahap selama periode perencanaan.

Dalam kerangka Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Kepemudaan Kabupaten Sukoharjo maka ditetapkan sasaran dan target Pembangunan Kepemudaan Kabupaten Sukoharjo adalah:

Tabel **Error! No text of specified style in document..**10 Sasaran dan Indikator Pembangunan Kepemudaan Kabupaten Sukoharjo

Sasaran	Indikator	2024 (kondisi awal)	Tahun				
			2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya kualitas pembangunan pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	60,83	62	64	66	68	70

Target tersebut menjadi ukuran kinerja pembangunan kepemudaan di Kabupaten Sukoharjo dan akan dijadikan dasar dalam penyusunan program, kegiatan, dan pengalokasian anggaran lintas perangkat daerah. Dengan demikian, arah, strategi, sasaran, dan target pembangunan kepemudaan yang termuat dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) ini tidak hanya menjadi pedoman teknis, tetapi juga merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk menyiapkan generasi muda yang unggul, tangguh, berdaya saing, serta mampu menjadi agen perubahan bagi pembangunan daerah dan nasional.

BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN

Tabel 5.11 Matriks Program Kegiatan Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Sukoharjo

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIFITAS	SATUAN	TAHUN				
						2025	2026	2027	2028	2029
DOMAIN PENDIDIKAN										
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Beasiswa pelajar berprestasi dan Kurang mampu	Jumlah pemuda dari keluarga kurang mampu yang mendapatkan beasiswa pendidikan	Orang	0	10	15	20	25
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kompetisi Pendidikan	Jumlah kegiatan lomba pendidikan antar SMP/SMA di Kabupaten Sukoharjo	Kegiatan	0	1	1	1	1
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Pembangunan Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru Nonformal/ Kesetaraan	Pembangunan Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru Nonformal/ Kesetaraan yang Telah Dibangun	Unit	1	1	1	1	1
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Orang	200	200	200	200	200
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal / Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	10	10	10	10	10

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIFITAS	SATUAN	TAHUN				
						2025	2026	2027	2028	2029
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	1	1	1	1	1
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	1	1	1	1	1
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	5	5	5	5	5
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	5	5	5	5	5
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Pembinaan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	1
PROGRAM PENGEMBANGAN	Pembinaan dan Pengembangan	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah	Unit	1	1	1	1	1

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIFITAS	SATUAN	TAHUN				
						2025	2026	2027	2028	2029
KAPASITAS KEPRAMUKAAN	n Organisasi Kepramukaan	Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota yang Berkualitas						
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Laporan	1	1	1	1	1
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Perpustakaan	1	1	1	1	1
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Lokus	60	90	90	90	90
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	Orang	0	26	26	26	26
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Orang	0	26	26	26	26

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIFITAS	SATUAN	TAHUN				
						2025	2026	2027	2028	2029
	Kabupaten/Kota									
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	100	100	100	100
DOMAIN KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN										
			Pembentukan klinik UBM (Upaya Berhenti Merokok) di Fasilitas kesehatan.	terwujudnya Klinik UBM	%	1,23	1,13	1,10	1	0.5
			Pelatihan UMB (Upaya Berhenti Merokok) bagi tenaga kesehatan.	Tersediaanya tenaga UMB						
			3Penyusunan Perda Kawasan Tanpa Rokok	Terwujudnya Perda KTR						
			Sosialisasi bahaya rokok	Penurunan angka perokok pemuda						
			Penyuluhan reproduksi di Sekolah	terwujudnya pengetahuan reproduksi pada anak sekolah	88 remaja					
			Pemberian Tablet Tambah Darah di sekolah	mencegah anemia pada anak sekolah						
			Puskesmas	meningkatkan						

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIFITAS	SATUAN	TAHUN				
						2025	2026	2027	2028	2029
			Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja	peneyediaan pelayan kesehatan remaja yg kualitas						
			Sekrening anemia pada remaja	tersekriningnya remaja anemia						
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	80	80	80	80	80
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	80	80	80	80	80
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pemeriksaan kesehatan anak usia pendidikan dasar	Jumlah anak usia dasar yang mendapatkan layanan kesehatan dasar	Orang					

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIFITAS	SATUAN	TAHUN				
						2025	2026	2027	2028	2029
	ta									
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Penyediaan Layanan Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	Dokumen	11	11	11	11	11

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIFITAS	SATUAN	TAHUN				
						2025	2026	2027	2028	2029
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat	Masyarakat	Masyarakat						
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	34	34	34	34	34
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	12	12	12	12	12
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	4	4	4	4	4

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIFITAS	SATUAN	TAHUN				
						2025	2026	2027	2028	2029
MASYARAKAT	Daerah Kabupaten/Kota									
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	2	2	2	2	2
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Sosialisasi dan Monitoring Perda KTR (Kawasan Tanpa Rokok)	Jumlah kegiatan Soislalisasi dan Monitoring Perda KTR	Kegiatan	2	2	2	2	2
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Jaminan Kesehatan Pemuda	Jumlah pemuda yang menjadi peserta aktif JKN/BPJS Kesehatan	Orang					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Penyediaan Layanan Kesehatan	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan	Orang					

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIFITAS	SATUAN	TAHUN				
						2025	2026	2027	2028	2029
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	dengan HIV (ODHIV)	dengan HIV (ODHIV)	kesehatan sesuai standar						
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Peningkatan kawasan bebas rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	Tatanan	1	3	3	5	7
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Pemberian layanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Dokumen	3	3	3	3	3
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	10	10	10	10	10

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIFITAS	SATUAN	TAHUN				
						2025	2026	2027	2028	2029
	dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Advokasi kebijakan pemerintah daerah yang berorientasi Kesehatan	Jumlah kebijakan berorientasi kesehatan	Kebijakan	17	18	19	20	21
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Melakukan penyuluhan kesehatan dalam rangka promotif dan preventif	Jumlah kegiatan penyuluhan kesehatan yang dilaksanakan	Kegiatan	8	8	8	8	8
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan	Penyusunan RAD P4GN	Jumlah penyusunan RAD P4GN dan monev	Kegiatan	0	0	1	1	1

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIFITAS	SATUAN	TAHUN				
						2025	2026	2027	2028	2029
	Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah								
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Sosialisasi edukasi dan penyadaran bahaya penggunaan NAPZA	Jumlah kegiatan edukasi dan penyadaran bahaya penggunaan NAPZA	Kegiatan	1	1	1	1	1
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Sosialisasi edukasi dan penyadaran bahaya penggunaan NAPZA	Jumlah pemuda yang mendapat edukasi dan penyadaran bahaya penggunaan NAPZA	Orang					

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIFITAS	SATUAN	TAHUN				
						2025	2026	2027	2028	2029
	Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota									
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pencegahan peningkatan P4GN	jumlah kegiatan sosialisasi dan penyuluhan P4GN	Kegiatan	1	1	1	1	1
PROGRAM PENGEMBANGAN	Pembinaan dan	Penyelenggaraan, pengembangan	Penyelenggaraan, Pengembangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan,	Dokumen	0	1	1	1	1

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIFITAS	SATUAN	TAHUN				
						2025	2026	2027	2028	2029
N KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAA N	Pengembanga n Olahraga Rekreasi	dan permasalahan festival dan olahraga rekreasi	dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi						
PROGRAM PENGEMBANGA N KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAA N	Pembinaan dan Pengembanga n Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Ko ta	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	Dokumen	2	2	2	2	2
PROGRAM PENGEMBANGA N KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAA N	Pembinaan dan Pengembanga n Olahraga Rekreasi	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Laporan	0	1	1	1	1
PROGRAM PEMBERDAYAA N SOSIAL	Pengembanga n Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Ko ta	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	26	26	26	26	26
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar,	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut	Orang	360	360	360	360	360

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIFITAS	SATUAN	TAHUN				
						2025	2026	2027	2028	2029
	Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota						
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga					
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga					
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang					
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi	Jumlah Pemuda yang tergabung dalam Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam	Orang					

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIFITAS	SATUAN	TAHUN				
						2025	2026	2027	2028	2029
KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						
DOMAIN LAPANGAN DAN KESEMPATAN KERJA										
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan kelompok masyarakat dalam pengakaragaman konsumsi sumber daya lokal	Jumlah Pemberdayaan kelompok masyarakat dalam pengakaragaman konsumsi sumber daya lokal	orang	-	24	24	24	24
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi	Presentase Kelompok yang menggunakan alsintan		75	75	75	75	75
				Persentase Penggunaan benih padi bersertifikat		92,7	92,7	92,7	92,7	92,7
				Presentase Penyaluran		96	96	96	96	96

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIFITAS	SATUAN	TAHUN				
						2025	2026	2027	2028	2029
				pupuk bersubsidi kepada petani						
			Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2 B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2 B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP 2B	Jumlah luas tanam		49815	49815	49815	49815	49815
				Presentase penggunaan alat mesin pertanian oleh petani		75	75	75	75	75
			Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Presentase gagal panen		3	3	3	3	3
				Presentase pengendalian penyakit zoonosis		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
			Penanganan dampak perubahan iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah area terdampak perubahan iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan		0	0	0	0	0
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan Usaha mikro dan		120	132	145	159	174

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIFITAS	SATUAN	TAHUN				
						2025	2026	2027	2028	2029
			UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui pendidikan dan pelatihan	Kewirausahaan						
			Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro		60	66	72	79	86
			Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro		100	110	121	133	146
			Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan		100	110	121	133	146
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Pendampingan perijinan usaha mikro untuk wirausaha muda	Jumlah pemuda yang memperoleh pendampingan ijin usaha	Orang	-	5	10	9	10
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan	Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah pemuda yang mendapatkan pelatihan pengembangan ekonomi kreatif	Orang	-	10	15	20	25

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIFITAS	SATUAN	TAHUN				
						2025	2026	2027	2028	2029
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Kreatif	Ekonomi Kreatif								
PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Kluster Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari Kerja berdasarkan Kluster kompetensi	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	Orang	50	55	60	70	75
PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan antar Kerja	Pelayanan antar Kerja	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kab/Kota (Aktifitas berupa OPP Pencari Kerja yang di tempatkan dan Pembinaan BKK)	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Orang	150	160	170	180	200
PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan Antar Kerja	Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang					
PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan antar Kerja	Perluasan Kesempatan Kerja	Pelatihan wirausa baru	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang					
PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	pelayanan AK-1 dan informasi lowongan kerja melalui aplikasi SIKENDI	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir	Orang					

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIFITAS	SATUAN	TAHUN				
						2025	2026	2027	2028	2029
				Hub)						
PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Job Fair/Bursa Kerja	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	100	125	130	135	140
PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	pemberdayaan PMI Purna Penempatan berupa pelatihan keterampilan	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Diberdayakan	Orang	3	4	5	6	7
PROGRAM PEMBERDAYAA NUSAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	terfasilitasinya Pemberdayaan usaha mikro Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	3	3	5	5	5
PROGRAM PEMBERDAYAA NUSAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan,	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Terfasilitasinya usaha mikro dalam Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	5	5	5	5	5

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIFITAS	SATUAN	TAHUN				
						2025	2026	2027	2028	2029
MIKRO (UMKM)	Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Pengembangan Usaha Mikro							
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Orang	45	50	50	50	50
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi yang diberikan kepada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Kegiatan	8	8	8	8	8
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	-	50	50	50	50

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIFITAS	SATUAN	TAHUN				
						2025	2026	2027	2028	2029
	ta, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota									
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Koordinasi, dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Kegiatan	2	2	2	2	2
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	Orang	-	30	30	30	30
PROGRAM PELAYANAN	Pelayanan perizinan dan	Penyediaan Pelayanan	Penyediaan Pelayanan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan	Orang					

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIFITAS	SATUAN	TAHUN				
						2025	2026	2027	2028	2029
PENANAMAN MODAL	non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/kota	Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik						
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/kota	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Orang	50	50	50	50	50
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	Sertifikat		100	150	200	250
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan	Sekolah Lapang, Pertemuan, Pendampingan, Penilaian Kelas Kemampuan	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit Lembaga	200	200	200	200	200

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIFITAS	SATUAN	TAHUN				
						2025	2026	2027	2028	2029
		Desa	Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani							
PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	IKM	35	45	50	60	65
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Pengembangan kepemimpinan melalui praktik even organizer	Jumlah pelatihan pemuda dalam mengorganisir suatu event	Kegiatan	30	35	40	45	50
DOMAIN PARTISIPASI KEPEMIMPINAN										
			Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah	Jumlah masyarakat/ jumlah keseluruhan masyarakat/ para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam pengelolaan		30	30	30	30	30

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIFITAS	SATUAN	TAHUN				
						2025	2026	2027	2028	2029
				sampah berbasis Masyarakat						
			Pengurangan sampah dengan melakukan perubahan pendaurulangan dan pemanfaatan kembali jumlah masyarakat/ Kelompok masyarakat/ para pihak yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	Prosentase jumlah sampah yang dikelola oleh masyarakat/ jumlah keseluruhan masyarakat/ para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat		15%	17%	18%	22%	30%
			Kegiatan adaptasi mitigasi perubahan iklim	Jumlah kegiatan yang melibatkan pemuda		10	10	10	10	10
			Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah yang mendapatkan Penghargaan Lingkungan Hidup		2	2	2	2	2
			Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah masyarakat/ kelompok masyarakat/ pelaku usaha/ kegiatan yang terlibat dalam kegiatan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup		40	40	40	40	40
			Pemberian	Jumlah penghargaan		1	1	1	1	1

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIFITAS	SATUAN	TAHUN				
						2025	2026	2027	2028	2029
			Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	yang diberikan ke masyarakat						
			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah masyarakat yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		30	30	30	30	30
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah kabupaten/Kota	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan masyarakat kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1	1
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Forum Tematik Kepemudaan dalam proses perencanaan dan penganggaran	Jumlah forum tematik kepemudaan yang dilaksanakan dalam proses perencanaan dan penganggaran	forum	1	1	1	1	1
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya	Seleksi Pemuda Pelopor	Jumlah kegiatan seleksi pemuda pelopor	Orang	5	5	5	5	5

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIFITAS	SATUAN	TAHUN				
						2025	2026	2027	2028	2029
	Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Saing Pemuda Pelopor								
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pendataan Organisasi Kepemudaan	Jumlah Organisasi Pemuda di Kabupaten Sukoharjo yang memiliki legalitas pendirian	Unit Organisasi	10	12	15	19	20
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan	Pemberian pendidikan kepemimpinan politik	Jumlah Pemuda yang mendapatkan pendidikan kepemimpinan politik atau kebijakan	Orang	100	100	150	150	150

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIFITAS	SATUAN	TAHUN				
						2025	2026	2027	2028	2029
BUDAYA POLITIK	Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah								
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pengembangan jiwa kepemimpinan pemuda dalam organisasi	Jumlah pemuda yang menjadi pengurus dalam organisasi	Orang	30	36	45	57	69
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan	Orang	100	100	100	100	100

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIFITAS	SATUAN	TAHUN				
						2025	2026	2027	2028	2029
	Karakter Bangsa	Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Bangsa	Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Bangsa	Sejarah Bangsa						
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Bangsa, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Bangsa, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Bangsa	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Bangsa, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Bangsa, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Bangsa, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Bangsa, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Bangsa	Orang	100	100	100	100	100
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	100	100	100	100	100

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIFITAS	SATUAN	TAHUN				
						2025	2026	2027	2028	2029
	Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Daerah	Daerah							
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya, Peningkatan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	100	100	100	100	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN	Perumusan Kebijakan	Pelaksanaan Kebijakan di	Pelaksanaan Kebijakan di	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan	Orang	30	30	30	30	30

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIFITAS	SATUAN	TAHUN				
						2025	2026	2027	2028	2029
N DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas P4GN	Kebijakan	1	1	1	2	2
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Peningkatan Kepemimpinan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	Orang	50	50	50	50	50

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIFITAS	SATUAN	TAHUN				
						2025	2026	2027	2028	2029
	Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota									
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Dokumen	5	5	5	5	5
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	12	12	12	12	12
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	Dokumen	1	1	1	1	1

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIFITAS	SATUAN	TAHUN				
						2025	2026	2027	2028	2029
	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat						
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	1	1	1	1	1

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIFITAS	SATUAN	TAHUN				
						2025	2026	2027	2028	2029
	Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota									
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Dokumen	5	5	5	5	5
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	10	10	10	10	10

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIFITAS	SATUAN	TAHUN				
						2025	2026	2027	2028	2029
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKA	Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/keompok Masyarakat	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/keompok Masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/keompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Lembaga	10	10	10	10	10
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	150	150	150	150	150
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan	Dokumen	12	12	12	12	12

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIFITAS	SATUAN	TAHUN				
						2025	2026	2027	2028	2029
	Daerah Kabupaten/Kota			Informasi Program atau Kebijakan						
DOMAIN GENDER DAN DISKRIMINASI										
			Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) oleh Penyuluh Agama yang sudah bersertifikat Fasilitator Bimbingan Perkawinan/sertifikat BRUS bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan DPPKBP3A	Jumlah SMA/SMK yang mengikuti kegiatan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)	Sekolah	2	2	2	2	2
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat dan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	1
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER	Pemberdayaan Perempuan Bidang	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan	Organisasi	15	15	15	15	15

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIFITAS	SATUAN	TAHUN				
						2025	2026	2027	2028	2029
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Politik,Hukum , Sosial,dan Ekonomipada OrganisasiKe masyarakatan KewenanganK abupaten/Kot a	Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota						
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	1
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	13	14	15	16	17
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan	Dokumen	2	2	2	2	2

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIFITAS	SATUAN	TAHUN				
						2025	2026	2027	2028	2029
	Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1	1	1	1	1
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Sosialisasi Gerakan Sadar Administrasi Kependudukan (GISA)	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Gerakan Sadar Administrasi Kependudukan (GISA)	Orang					
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang					

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIFITAS	SATUAN	TAHUN				
						2025	2026	2027	2028	2029
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	3	3	3	3	3
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kampung	26	26	26	26	26
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,	Laporan	1	1	1	1	1

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIFITAS	SATUAN	TAHUN				
						2025	2026	2027	2028	2029
	dan Kesejahteraan Keluarga	Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)						

Sebagai upaya untuk memastikan bahwa Program dan Kegiatan dalam RAD Pelayanan Kepemudaan yang disusun dapat dijalankan dengan baik, maka perlu adanya pembentukan tim koordinasi pelaksana RAD Pelayanan Kepemudaan di Kabupaten Sukoharjo.

Pembentukan tim koordinasi RAD Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029 engacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan. Struktur tim koordinasi RAD Pelayanan Kabupaten Sukoharjo dijabarkan sebagai berikut:

I Pengarah

- a. Ketua : 1. Bupati Kabupaten Sukoharjo
2. Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo
- b. Wakil Ketua ; Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
- c. Sekretaris : Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo
- d. Anggota ; 1. Assisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo

II Pelaksana

- a. Ketua : Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo
- b. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo
- c. Anggota : 1. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo
5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo
6. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo
7. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo
8. Kepala Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo
9. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo
10. Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo
11. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo
12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo
13. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Sukoharjo

14. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo
15. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo
16. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo
17. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sukoharjo

III Sekretariat

- a. Ketua : Sekretaris Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo
- b. Wakil Ketua : Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukoharjo

IV Bidang-Bidang Kelompok Kerja

a. Kelompok Kerja Bidang Pendidikan

1. Koordinator merangkap anggota : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo
2. Anggota :
 1. Unsur Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo
 2. Unsur Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo
 3. Unsur Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo
 4. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo
 5. Unsur Kementerian Agama
 6. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo

b. Kelompok Kerja Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan

1. Koordinator merangkap anggota : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo
2. Anggota :
 1. Unsur Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo
 2. Unsur Polres Kabupaten
 3. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo
 4. Unsur Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo
 5. Unsur Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo
 6. Unsur Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo
 7. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo
 8. Unsur Dinas Pengendalian penduduk,

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo

9. Unsur Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo

c. Kelompok Kerja Bidang Lapangan dan Kesempatan Kerja

1. Koordinator merangkap anggota : Kepala Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja

2. Anggota : 1. Unsur Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo
2. Unsur Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo
3. Unsur Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo
4. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo
5. Unsur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo
6. Unsur Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo
7. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo

d. Kelompok Kerja Bidang Partisipasi dan Kepemimpinan

1. Koordinator merangkap anggota : Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sukoharjo

2. Anggota : 1. Unsur Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo
2. Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo
3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo
5. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo
6. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo

e. Kelompok Kerja Bidang Gender dan Diskriminasi

1. Koordinator merangkap anggota : Kepala Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo

2. Anggota : 1. Unsur Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo
2. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Sukoharjo

3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk mengukur kinerja pelaksanaan capaian indikator sasaran, dan capaian kinerja program/kegiatan/ sub kegiatan yang tercantum dalam RAD Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan pemantauan dan evaluasi adalah untuk mengetahui kesesuaian aktivitas program yang dilakukan, apakah sudah sesuai atau menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan, untuk selanjutnya dapat dilakukan langkah-langkah guna meningkatkan tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029.

Selain itu, pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui masalah yang terjadi dalam pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029 memberikan penilaian keberhasilan dari sisi keluaran, kegunaan dan dampaknya bagi masyarakat sasaran.

1. Monitoring / Pemantauan

Monitoring/pemantauan adalah proses pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program. Memantau perubahan, yang fokus pada proses dan keluaran, pemantauan memperhitungkan apa yang kita lakukan dan mengamati kualitas dari layanan yang telah diberikan. Pemantauan bertujuan mendapatkan umpan balik bagi kebutuhan program yang sedang berjalan, terutama kebutuhan biaya, waktu kegiatan, personel dan peralatan yang dibutuhkan.

Evaluasi bertujuan memperoleh informasi yang tepat sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan tentang perencanaan program, keputusan tentang komponen input pada program, implementasi program yang mengarah kepada kegiatan dan keputusan tentang output menyangkut hasil dan dampak dari aktivitas kegiatan. Secara lebih terperinci pemantauan yang dilaksanakan bertujuan untuk :

- a. Mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan pelayanan kepemudaan;
- b. Memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan pelayanan kepemudaan
- c. Menjadikan bahan pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas pelayanan kepemudaan;
- d. Menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan pelayanan kepemudaan.

Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan aktivitas kegiatan dalam pelayanan kepemudaan di Kabupaten Sukoharjo melibatkan segenap perangkat daerah (PD) terkait, kalangan dunia usaha, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pelayanan kepemudaan di Kabupaten Sukoharjo.

2. Evaluasi

Evaluasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menilai tingkat kinerja suatu program. Evaluasi kebijakan digunakan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu program pembangunan. Evaluasi adalah proses penilaian yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas permasalahan yang ditemukan. Evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat “membuahkan hasil”, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan/atau target kebijakan publik yang ditentukan.

Evaluasi dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Evaluasi internal adalah evaluasi yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah (PD) yang terlibat dalam pelaksanaan program pangan dan gizi secara multisektor. Evaluasi eksternal adalah evaluasi yang dilakukan oleh lembaga/instansi diluar pemerintah daerah, yaitu kalangan dunia usaha, perguruan tinggi (PT), lembaga swadaya masyarakat (LSM) termasuk media massa. Evaluasi dari pihak eksternal diharapkan memberikan informasi atau penilaian hasil yang lebih obyektif. Obyektivitas evaluasi diperlukan bagi pengambilan kebijakan selanjutnya, terutama untuk penyusunan rencana program/ kegiatan pada tahun berikutnya.

Evaluasi penyelenggaraan aktivitas dalam RAD Pelayanan Kepemudaan di Kabupaten Sukoharjo adalah kegiatan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang bekerjanya sesuatu aktivitas kegiatan yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif atau pilihan yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Tujuannya adalah dapat ditemukannya data/informasi pelaksanaan aktivitas kegiatan di lapangan yang hasilnya bisa positif ataupun negatif yang dapat menjadi masukan bagi pengembangan aktivitas kegiatan selanjutnya. Dengan demikian maka dapat diketahui capaian kinerja aktivitas kegiatan dengan membandingkan antara target capaian dengan realisasi pada akhir tahun atau akhir perencanaan. Disamping itu dalam pelaksanaan evaluasi dapat diketahui hambatan/kendala yang terjadi selama pelaksanaan pelayanan kepemudaan. Hasil identifikasi hambatan/kendala pelaksanaan aktivitas kegiatan pelayanan kepemudaan dapat menjadi masukan bagi perbaikan di tahun-tahun mendatang.

Pelaksanaan evaluasi program/kegiatan dalam RAD Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Sukoharjo melibatkan segenap perangkat daerah (PD) terkait, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki perhatian terhadap aktivitas kegiatan di Kabupaten Sukoharjo.

3. Waktu Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

Waktu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi minimal dilaksanakan satu (1) kali dalam satu tahun dan lama waktu pelaksanaan disesuaikan dengan kondisi pada masing-masing perangkat daerah. Adapun mekanisme kerja evaluasi adalah :

- 1) Menyiapkan kerangka acuan serta instrumen pemantauan dan evaluasi.
- 2) Menentukan waktu pemantauan dan evaluasi, tim dan lokasi.
- 3) Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah tetapi dapat juga dengan menggunakan pihak eksternal dalam evaluasi.
- 4) Menyiapkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi.

4. Pelaporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi

Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi merupakan faktor penting dalam manajemen pengelolaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan agar dapat digambarkan perkembangan dan dampaknya kepada masyarakat.

- 1) Tujuan Pelaporan:
 - a. Memberikan informasi mengenai proses pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Kla Sukoharjo ten.
 - b. Memberikan informasi mengenai pencapaian dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan di Kabupaten Sukoharjo
 - c. Menyiapkan kebijakan dan rekomendasi pelaksanaan pelayanan kepemudaan pada tahun berikutnya.

- d. Menyiapkan bahan sosialisasi dan advokasi pelayanan kepemudaan di Kabupaten Sukoharjo.
- 2) Mekanisme Pelaporan:
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo melaksanakan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan bersama perangkat daerah serta melaporkannya kepada Bupati Kabupaten Sukoharjo paling lambat bulan Maret tahun berikutnya.
- 3) Isi Laporan yang dikirimkan terkait Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi RAD Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Sukoharjo, adalah sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan :
 - 1) Latar Belakang
 - 2) Tujuan
 - b. Pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Sukoharjo:
 - 1) Gambaran Umum Pencapaian Indikator Sasaran RAD
 - 2) Gambaran Umum Pelaksanaan Aktivitas Kegiatan RAD
 - 3) Tantangan yang Dihadapi
 - 4) Tindakan dalam Mengatasi Tantangan.
 - c. Rekomendasi dan Rencana Tahun Depan
 - 1) Rekomendasi.
 - 2) Rencana Tahun Depan.

Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029 merupakan wujud koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan kepemudaan yang dilaksanakan oleh daerah.

Mengingat urgensi dan pentingnya Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029 ini maka dukungan semua pihak utamanya perangkat daerah terkait di Kabupaten Sukoharjo sangat diperlukan, agar pelayanan kepemudaan berupa penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, pengembangan kepemimpinan pemuda, pengembangan kewirausahaan pemuda, pengembangan kepeloporan pemuda, dapat di rencanakan dan dijalankan secara sinergis dan lintas sektor sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI